

# INTERVENSI “KEBIJAKAN ETIS” KOLONIAL PADA LANSKAP BUDAYA SULAWESI TENGAH:

Dampak Pemerintahan Belanda di Palu dan Lembah Kulawi, 1905–1942

Robert Weber, Werner Kreisel, Heiko Faust (penerjemah Anto Sangadji)

*Diterbitkan sebagai “Colonial Interventions on the Cultural Landscape of Central Sulawesi by “Ethical Policy”: The Impact of the Dutch Rule in Palu and Kulawi Valley, 1905–1942” (2002) STORMA Discussion Paper, Subprogram A, Social and Economic Dynamics in Rain Forest Margins No. 2, University of Göttingen.*

## Pengantar

Sementara wilayah tengah Indonesia memiliki sebuah sejarah panjang penelitian ilmiah dalam geografi budaya, Sulawesi Tengah masih merupakan wilayah yang belum dipetakan. Penjajah Belanda, yang menguasai kepulauan Indonesia dari tahun 1602 hingga 1942, pada dasarnya mengabaikan wilayah tersebut selama berabad-abad. Ketika mereka menempatkan pejabat kolonial di Indonesia pada awal abad ke-20 (lihat Gambar 1), interval pendek kehadiran mereka (1905 hingga 1942) meninggalkan sebuah warisan mengenai modifikasi-modifikasi struktural yang sangat besar pada lanskap budaya. Semua dampak tersebut dilakukan dengan dalih "kebijakan etis". Perkembangan pascakolonial wilayah tersebut telah dibentuk oleh intervensi-intervensi kolonial Belanda, yang memberikan sebuah landasan untuk menjelaskan struktur-struktur dan proses-proses pengaturan spasial terkini.

*Memories van overgave*, memori-memori serah terima, laporan-laporan yang disiapkan para pejabat kolonial daerah, menyediakan data dan informasi yang kaya untuk rekonstruksi tentang pembangunan lanskap budaya

di Sulawesi Tengah. Namun, memori-memori tersebut mewakili sebuah pandangan sepihak, yaitu pandangan kekuasaan kolonial yang sedang memerintah. Selain itu, laporan-laporan tersebut terstruktur dengan sangat jelas yang membuatnya, di satu sisi, lebih mudah untuk membandingkan perkembangan-perkembangan dari waktu ke waktu, tetapi, di sisi lain, menjadikannya sebuah sumber yang agak terbatas. Kemunculan bagian-bagian yang dihapus dalam laporan menggambarkan penyensoran yang membatasi penggunaan sumber-sumber tersebut juga. Namun demikian, *Memories van overgave* adalah, selain sumber-sumber yang diterbitkan, satu-satunya kumpulan data di tingkat mikro yang menyediakan informasi tentang dampak pemerintahan kolonial Belanda pada lanskap budaya. Selain itu, kita tidak boleh melupakan pentingnya penggambaran sikap para penulis terhadap kebijakan etis yang dibahas dalam makalah ini. Meskipun para penulis lain telah menggunakannya, sejauh ini tidak ada analisa-analisa rinci dari laporan-laporan tersebut yang mengacu pada dampak pada lanskap budaya Sulawesi Tengah bagian barat. Laporan-laporan tersebut telah dianalisa untuk administrasi kolonial Belanda unit *onder-*

*afdeeling* Palu<sup>1</sup> (Gbr.2, lihat juga Weber, 2000) di bawah pendekatan penelitian khusus sub-proyek STORMA<sup>2</sup> A1.

Studi tentang lanskap budaya, yang terkait dengan asal-usul dan oleh karena itu selalu terdiri dari sebuah komponen historis (waktu) dan sebuah komponen regional (ruang), mewakili sebuah bidang penelitian geografis yang otentik. Dampak-dampak kolonial di Sumatera sebagai salah satu daerah luar Jawa yang besar telah dibahas, antara lain, dalam publikasi-publikasi Reid (1997), Kipp (1990) dan Thee Kian Wie (1989). Hasil-hasil penelitian tentang lanskap budaya Bali dan Lombok telah disusun misalnya oleh Tarnutzer (1995) dan Leemann (1976; 1989). Tentang Sulawesi, antara lain dapat dilihat pada karya-karya Henley (1989; 1996a; 1996b; 1997), Jäckel (1990), Tonelli (1992), Rössler (1997), Poeze dan Schoorl (1991) dan Schrauwers (1999) adalah yang menggunakan sebuah pendekatan geografis atau antropologi budaya. Namun jumlah publikasi-publikasi tentang zaman penjajahan Belanda khususnya di Sulawesi Tengah masih cukup sedikit. Bahkan disertasi rinci Coté (1979) hanya

membahas bagian timur Sulawesi Tengah, publikasi-publikasi Kotilainen (1992), Acciaioli (1989) atau Aragon (1992) yang sangat berguna meneliti bagian barat Sulawesi Tengah, tetapi hanya menaruh perhatian pada sebuah bagian kecil dari masa kolonial Belanda dan tidak menggambarkan kompleksitas lanskap budaya. Dengan demikian, makalah ini adalah untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian yang diperlukan tentang geografi budaya mengenai topik ini.

Untuk lebih memahami dampak-dampak pemerintahan kolonial di Sulawesi Tengah dan peran khusus yang dimainkan oleh kebijakan etis, pertama-tama harus disajikan sebuah tinjauan singkat tentang sejarah kolonial Belanda di Asia Tenggara.

### **Fase-fase Pemerintahan Kolonial Belanda di Kepulauan Indonesia dan Hubungannya dengan Sulawesi Tengah**

#### *Kolonisasi Eropa*

Perkembangan-perkembangan di kepulauan Indo-Melayu sebelum kedatangan orang-orang Eropa (lihat misalnya Kötter et al., 1979; Ricklefs, 1981) membuat Sulawesi Tengah tidak tersentuh sama sekali. "Berbeda dengan Jawa, Bali, dan, sampai batas tertentu di pesisir Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah sedikit terdampak oleh Indianisasi selama dan setelah milenium pertama Masehi." (Aragon, 1992:105). Di lembah-lembah besar Sulawesi Tengah – yang medannya terjal terus menghadirkan sebuah masalah bagi pembangunan-pembangunan infrastruktur hingga saat ini – kelompok-kelompok etnis yang berbeda mengembangkan bahasa-bahasa mereka sendiri dan hidup terisolasi satu sama lain dalam kurun waktu yang panjang (Kruyt, 1935: 586f). Wilayah raja-raja Palu, Banawa dan

<sup>1</sup> Di bawah pemerintahan kolonial Belanda kepulauan Indonesia dibagi menjadi unit-unit administratif berikut: *Gewesten* (misalnya Groote Oost), *Keresidenan* (misalnya Manado), *Afdeelingen* (misalnya Donggala), *Onderafdeelingen* (misalnya Palu) dan *Landschappen* (misalnya Sigi-Biromaru).

<sup>2</sup> STORMA (*Stability of Rainforest Margins in Indonesia*) adalah program penelitian kolaboratif yang dibiayai *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (DFG) dari Universitas Goettingen, Kassel (keduanya di Jerman) dan Palu (Sulawesi Tengah, Indonesia), dan Institut Pertanian Bogor (Indonesia). Sejak Juli 2000, para peneliti lembaga ini mempelajari proses stabilisasi dan destabilisasi di sekitar Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Sub-proyek A1 memeriksa proses-proses ini dalam kaitannya dengan geografi budaya.

Dolo yang terletak di sisi barat Sungai Palu dan Teluk Palu serta wilayah raja-raja Sigi dan Tawaeli yang terletak di sisi timur bermusuhan (Kruyt, 1938, 1:27). Orang Bugis tidak menjalin hubungan-hubungan lebih dekat dengan orang-orang di daerah pegunungan (istilah toraja<sup>3</sup> diperkenalkan untuk kelompok-kelompok tersebut oleh orang-orang Eropa) karena ketakutan terhadap dugaan pengayauan (Emmer et al., 1988:216; Ricklefs, 1981:61f).

Portugis adalah orang-orang Eropa pertama yang mencapai kepulauan Indonesia dengan mengarungi Tanjung Harapan. Seperti Belan-

---

<sup>3</sup> Klasifikasi bahasa atau kelompok etnis yang berbeda di Sulawesi Tengah selalu menjadi bahan kontroversi (untuk konstruksi "kelompok etnis", lihat Balibar dan Wallerstein, 1992). Umumnya, istilah Toraja digunakan. Menurut Coté (1979:42), Kruyt pertama kali menerapkan istilah ini pada suku-suku di Sulawesi Tengah bagian utara pada tahun 1897. Bersama Adriani, ia menyebut suku-suku Sulawesi Tengah bagian timur *Posso'sch-Todjo'sche groep*, *Oost-Toradja groep* atau *Bare'e-Toradja* dan suku barat *Parigi'sch-Kaili'sche groep* atau *West-Toradja groep*. Ini diselesaikan oleh *Sadang-groep* yang terletak di selatan daerah ini ([Adriani dan Kruijt 1912–1914, vol. 1:3](#)). Menurut Vroklage (1936:227) kata Toraja terdiri dari *To* yang berarti "manusia", dan *raja* yang dipengaruhi Bugis untuk menunjukkan Toraja sebagai "penduduk dataran tinggi" atau "penduduk terpencil". Kata *raja* memiliki arti yang sama dengan kata Melayu *dajak* yang digunakan dengan cara yang mirip untuk menamai penduduk pegunungan Dayak. Coté (1979) mungkin adalah orang asing pertama yang menggunakan nama kelompok bahasa individu untuk deskripsi yang lebih tepat tentang orang-orang di daerah ini. Kotilainen (1992:16) menunjukkan bahwa orang Sulawesi Tengah tidak pernah menggunakan satu istilah pun untuk menyebut semua kelompok di wilayah ini. Namun, karena istilah universal Toraja digunakan dalam sumber-sumber dasar dan sekunder hingga akhir 1970-an, yang membuat pembedaan orang-orang secara tepat menjadi tidak mungkin, istilah ini juga digunakan di sini, meskipun arti umum Toraja sekali lagi harus digarisbawahi.

da yang menyusul beberapa saat kemudian, mereka tertarik ke kepulauan Asia Tenggara dengan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Pada tahun 1596 kapal dagang Belanda pertama tiba di Jawa Barat (Gretzer, 1939:20; Kötter et al., 1979:78). Pada tanggal 20 Maret 1602, Perusahaan Hindia Timur Belanda (*Verenigde Oostindische Compagnie*, VOC) milik Joan van Oldenbarnveld diberikan hak atas wilayah antara Tanjung Harapan di Barat dan Selat Magellan di Timur. Kebijakan VOC singkat dan padat serta berdasarkan prinsip sedikit impor tetapi ekspor-ekspor yang mahal (Fieldhouse, 1965: 97, 100). Kehadiran Belanda yang nyata di Nusantara dengan demikian terbatas di Jawa dan pelabuhan-pelabuhan seperti di Ambon, Kepulauan Maluku. Setelah Malaka ditaklukkan pada tahun 1641 (pada waktu itu merupakan sebuah pusat perdagangan penting bagi seluruh Asia Tenggara), wilayah perdagangan Belanda berkembang pesat dari Ceylon sampai Formosa. Bahkan Makassar di Sulawesi Selatan, yang menjadi tempat tahanan bagi semua kekuatan musuh Belanda, ditaklukkan oleh Kompeni pada tahun 1668 (Kötter et al., 1979:78f).

Dampak-dampak tidak langsung pertama dari pemerintahan Belanda pada lanskap budaya Sulawesi Tengah dengan demikian diciptakan oleh migrasi orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Setelah penaklukan Belanda atas Makassar, banyak orang Bugis yang melarikan diri ke Kalimantan atau Malaya. Yang lainnya mengungsi di pesisir-pesisir Sulawesi Tengah yang dikuasai Ternate (Maluku) (Kotilainen, 1992:46). Pada awal abad ke-17, ibu kota provinsi Palu saat ini dianggap sebagai pelabuhan penting dalam perdagangan maritim (Aragon, 1992:136). Pada tahun 1684, daerah tersebut jatuh ke tangan VOC tetapi tetap tunduk pada Sultan

Ternate dan ditempatkan di bawah kekuasaan Makassar Sulawesi Selatan pada tahun 1710 (Wichmann, 1890:984).

Sementara itu, Kompani berkembang pesat hingga awal abad ke-18. Setelah mengamankan monopoli di kepulauan Indonesia, kontrak-kontrak persekutuan ditandatangani dengan raja-raja pribumi untuk menerapkan prinsip pemerintahan tidak langsung. Satu abad setelah berdirinya VOC, Belanda — selain Jawa — masih menguasai apa yang disebut kepemilikan-kepemilikan luar (*Buitenbezittingen*, yang disebut kepulauan luar Jawa) melalui pelabuhan-pelabuhan, seperti Makassar di Sulawesi (Fieldhouse, 1965:89 dst; Kahn, 1981:189). Upaya-upaya kristenisasi atau asimilasi penduduk, yaitu melalui sekolah-sekolah misionaris, tidak dilakukan pada waktu itu. Fieldhouse (1965:101) menyimpulkan bahwa, "seandainya Belanda menyerahkan Indonesia dan Asia Timur Jauh pada akhir abad ke-18, hanya sedikit jejak yang tersisa dari dua ratus tahun kekuasaan mereka."

Pada awal paruh kedua abad ke-18, ilusi tentang perusahaan komersial yang sukses masih bertahan. Selain para pemegang saham, negara Belanda juga diuntungkan oleh keberhasilan VOC dari pendapatan pajak yang sangat besar yang diperoleh dari perdagangan Asia Timur<sup>4</sup> (Fieldhouse, 1965:102; Kahn, 1981:190). Setelah 150 tahun neraca pembayaran yang positif, hutang-hutang Kompeni bertambah, dengan pemegang saham semakin kaya dengan mengorbankan VOC (Fieldhouse, 1965:101). Dengan berakhirnya Piagam pada tanggal 31 Desember 1799, negara Belanda mengambil alih utang-utang dan harta-harta milik VOC, sehingga menandai berakhirnya "zaman keemasan" sejarah kolonial Belanda.

<sup>4</sup> Perdagangan Asia Timur pada waktu itu mewakili seperempat dari perdagangan ekspor Belanda.

### *Dari Koloni Negara ke Negara Kolonial*

Setelah peralihan kekuasaan Inggris (1811–1815 di bawah Thomas Stamford Raffles), Gubernur Jenderal yang baru, Herman Willem Daendels, dengan cepat berbalik dari sikap liberalnya setibanya di Nusantara. Alih-alih menghapuskan kerja paksa, ia memperluasnya dengan menyertakan aristokrasi Jawa. Bahkan suatu penghormatan tertentu masih diberikan kepada raja-raja pribumi pada masa VOC untuk memastikan kesetiaan mereka sebagai perantara-perantara dan pengendali-pengendali penduduk, Daendels hanya menggantikan raja-raja yang sulit dengan yang lain (Altona, 1890:18).

Saat itu, Belanda mengintensifkan kekuasaannya dengan beralih dari kekuasaan tidak langsung VOC ke kekuasaan langsung terutama di Jawa, pusat jajahan. Dengan hal ini, Belanda tidak hanya menggunakan pelabuhan-pelabuhan strategis untuk perdagangan mereka, tetapi mulai lebih berupaya membangun sebuah infrastruktur di pulau itu. Pengambilalihan pemerintahan oleh *Binnenlandsch Bestuur*<sup>5</sup> dimaksudkan untuk menjadikan koloni negara tersebut sebagai sebuah negara kolonial yang mampu berdiri sendiri secara independen dari Belanda. Tetapi bahkan setelah Kongres Wina tahun 1815, yang sekali lagi mengizinkan ekspansi Belanda tanpa batas di kepulauan Indonesia, beberapa pangkalan pelabuhan di pulau-pulau selain Jawa, pulau Banda dan Ambon, berada di bawah kekuasaan langsung *Binnenlandsch Bestuur*, administrasi internal Hindia Belanda.

Dengan dicabutnya pembatasan perdagang-

<sup>5</sup> Administrasi urusan dalam negeri. Belanda tidak hanya ingin menguasai beberapa pelabuhan tetapi juga pembangunan ekonomi dan infrastruktur di bagian-bagian pedalaman pulau-pulau itu. Untuk itu perlu dibentuk sistem administrasi khusus.

an rempah-rempah, kepentingan-kepentingan kolonial bergeser ke pembangunan perkebunan. Selama konversi ke apa yang disebut *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa), yang dimulai pada tahun 1830, upaya-upaya dilakukan untuk memperluas pengaruh langsung Belanda. Namun, ini sebagian besar terbatas pada pulau Jawa (Sieber, 1949:165ff). Pengenalan *cultuurstelsel* oleh Johannes van den Bosch dimaksudkan untuk mengamankan kemandirian finansial koloni, perluasan perkebunan secara maksimal di Jawa, dan ekspor produk-produk kolonial untuk pasar Eropa. Van den Bosch berusaha mencapai hal tersebut dengan menggunakan tenaga kerja budak, yang dia sukai sebagai sebuah alternatif murah terhadap tenaga kerja bebas (Frank, 1911:22). Kopi, teh, nila, gula dan tembakau diekspor ke Eropa sejak saat itu. Dengan sistem *cultuurstelsel*, kopi menjadi tanaman wajib di perkebunan-perkebunan di pantai barat Sumatera dan di pemukiman Manado, Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah, bagaimanapun, terus menjadi kurang menarik bagi Belanda.

Selain mewakili dimensi baru budidaya perkebunan, Fasseur menganggap *cultuurstelsel* sebagai titik-titik transisi ke klasifikasi ras resmi di Hindia Belanda. Hal tersebut karena pengenalan sistem ini,

dikombinasikan dengan segala macam kerja corvee, menekankan kesenjangan yang tampaknya tak terjembatani antara orang Eropa dan "pribumi". Mari kita kutip J.C. Baud, salah seorang arsitek kebijakan kolonial baru ini: "Bahasa, warna kulit, agama, moral, asal-usul, kenangan sejarah, semuanya berbeda antara Belanda dan Jawa. Kami yang memerintah, mereka yang diperintah" (Fasseur, 1994:33).

Sistem tanam paksa terbukti menjadi sebuah tambang emas bagi negara Belanda. Pada awal tahun 1831, pembayaran pertama dapat dilakukannya untuk menutupi hutang VOC (Ricklefs, 1981:117).

Mulai pertengahan abad ke-19, sistem tanam paksa secara bertahap berakhir. Caldwell dan Utrecht (1979:21) mengutip tiga penyebab keruntuhan *cultuurstelsel*. Selain kejatuhan harga kopi dan gula (97% dari hasil *cultuurstelsel*) dan peningkatan kepentingan-kepentingan bisnis swasta di nusantara, semangat liberal tahun 1848 juga mempengaruhi sistem penanaman paksa yang terorganisir secara terpusat. Kelaparan yang disebabkan oleh monokultur tanaman komersial (Gretzer, 1939:21) menyebabkan pemikiran Belanda liberal untuk menyebarkan sebuah gagasan ekonomi yang lebih liberal di koloni.

Dengan beberapa pengecualian, negara secara bertahap menarik diri dari penanaman aktif di negeri tersebut. Sejak saat itu, aksinya sebatas menjaga *rust en orde* (kedamaian dan ketertiban) serta melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur. Hal ini telah membuka pintu bagi "gelombang besar kegiatan ekonomi yang akan berlangsung selama bertahun-tahun hingga Perang Dunia Pertama" (Prince, 1995:22).

Dengan dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, jumlah orang Belanda yang ingin mengembangkan diri mereka di koloni mulai meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, diperlukan impor besar barang-barang konsumsi dan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang utama. Undang-Undang Agraria tahun 1870 juga menjamin kebebasan dan keamanan para pengusaha. Meskipun hanya penduduk pribumi yang diperbolehkan memiliki tanah, orang-orang asing diizinkan untuk menyewa tanah dari pemerintah selama 75 tahun atau

dari para pemilik pribumi selama 5 sampai 20 tahun (Ricklefs, 1981:118). “Pintu-pintu sekarang terbuka untuk perkembangan kapitalisme di koloni” (Kahn, 1981: 194).

Setelah tahun 1870, pemerintahan langsung Belanda meluas ke pulau-pulau besar Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Negara-negara pribumi dimasukkan ke dalam hierarki Belanda sebagai *Zelfbesturen* (otonomi) (Cribb, 1994:5). Namun, sejauh ini pertumbuhan ekspor pertanian tropis yang paling dinamis terjadi di pulau-pulau luar Jawa, terutama di Sumatera (Barlow, 1989:231). Perkebunan-perkebunan di Sumatera meluas jauh ke pulau itu, dan Belanda juga memperluas perkebunan mereka di Kalimantan. Mereka memperkuat lingkup pengaruh mereka di Sulawesi Selatan dan Bali sementara Kepulauan Sunda kecil (Nusa Tenggara) di Timur telah ditaklukkan pada tahun 1840 (Sieber, 1949:167).

Menurut Cribb (1994:3 dst), tahun 1880-an ditandai dengan semakin cepatnya perubahan "negara" dagang VOC menjadi sebuah negara kolonial biasa. Modifikasi-modifikasi paling menonjol mulai muncul sejak paruh kedua abad ke-19 dan terutama pada awal abad ke-20. Modifikasi-modifikasi terlihat dalam tiga bidang:

- 1) kemerdekaan koloni yang meningkat dari negara induk,
- 2) struktur pemerintahan yang semakin kompleks dan seragam, dan
- 3) sebuah pergeseran kebijakan menuju sebuah kebijakan pembangunan yang paternalistik dari tahun 1900 dan seterusnya.

Sistem negara kolonial ganda, di mana pejabat-pejabat Eropa yang terlatih namun tidak terspesialisasi mengatur melalui struktur-struktur pribumi, berubah pada akhir abad ke-

19. Kantor-kantor yang baru dibentuk mengambil alih koordinasi bidang-bidang administrasi khusus seperti keuangan atau pertanian. *Binnenlandsch Bestuur* yang maha kuasa dengan demikian kehilangan keunggulannya (ibid.).

Posisi *Partij Anti-Revolutionaire*, yang menyatakan bahwa penduduk pribumi di koloni harus dididik seperti anak-anak, menjadi sebuah tolok ukur moral kebijakan kolonial setelah 1888, tahun ketika partai Kristen-konservatif berkuasa (Coté, 1996:90). Kielstra (1922:10) melihat bahwa peran utama kekuasaan kolonial di kepulauan Indonesia adalah secara cepat memungkinkan wilayah tersebut untuk meraih keunggulan dalam perdagangan global yang didasarkan pada sumber-sumber dayanya yang kaya.

Berkenaan dengan Sulawesi Tengah, *Resident*<sup>6</sup> Logeman (MMK 304:164) kemudian menganggap keterbelakangan, yang masih dialami beberapa daerah *residensi* – yaitu sebagian besar dari *afdeeling Midden-Celebes*<sup>7</sup> – karena tidak adanya kekuasaan kolonial selama satu abad. Campur tangan mereka dan intervensi intensif, katanya, membawa sebuah perubahan yang menguntungkan. Akan tetapi, daerah-daerah itu akan memerlukan administrasi oleh pejabat-pejabat yang efisien, yang dapat melaksanakan tugas mereka dengan ambisius dan yang akan tahu bagaimana memimpin para administrator lokal (*Zelfbesturders*). Kesulitan-kesulitan di daerah tersebut juga dapat mempengaruhi faktor lain yang diinginkan yaitu pelanggaran perdamaian di koloni untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan. Seperti yang dinyatakan Kielstra (1922:16), akan tetap ada sebuah masalah sosial. Seseorang harus berhati-hati

<sup>6</sup> Kepala Belanda *residentie*.

<sup>7</sup> *Afdeeling Midden-Celebes* kemudian disebut *afdeeling Donggala*.

untuk menghindari sebuah situasi di mana orang-orang luar secara eksklusif memimpin setiap perusahaan dan penduduk pribumi hanya terlibat sebagai pekerja-pekerja pelengkap. Jika sebuah situasi seperti itu pernah terjadi, maka bahaya-bahaya yang cukup besar dapat terjadi karena pertentangan ekonomi antara pengusaha dan pekerja akan, pada saat yang sama, menjadi sebuah pembelahan rasial antara Eropa dan Pribumi, sebuah situasi yang jauh lebih berbahaya bagi perdamaian.

Pada periode terakhir pemerintahannya di Indonesia saat itu (sekitar 1890-1942), pemerintah kolonial Hindia-Belanda berfokus pada pembebasan penduduk pribumi. Pembebasan tidak harus dipahami dalam sebuah pengertian anti-kolonial, tetapi sebagai dukungan untuk kelangsungan hidup satu abad sebuah negara kolonial yang diharapkan oleh Belanda. Negara kolonial ini harus didasarkan pada loyalitas sebuah elit pribumi terpelajar. Dampak-dampak zaman kolonial terhadap lanskap budaya dan penduduk di wilayah studi kasus di Sulawesi Tengah harus dilihat dengan latar belakang ini.

Pada abad ke-20, kekuasaan kolonial secara paksa memperluas cakupan pengaruh langsungnya ke luar Jawa. Dengan pasifikasi kepulauan tersebut dan diperkenalkannya apa yang disebut *Korte Verklaringen* (plakat-plakat pendek), Belanda akhirnya menjauhkan diri dari kebijakan non-intervensi yang dipraktikkan sebelumnya. Dengan ditanda-tangannya plakat-plakat tersebut maka terciptalah *zelfbesturende landschappen*,<sup>8</sup> yaitu daerah yang masih dikelola oleh raja-raja pribumi setempat dan bukan administrasi langsung (misalnya di Pemerintah Sulawesi Selatan). *Beginsel Programma* oleh J.B. van Heutzs

<sup>8</sup> "Daerah yang dikelola sendiri"; tetapi istilah "dikelola sendiri" dalam konteks ini mengecualikan semua konsep emansipatoris.

tahun 1907 menunjukkan intervensi mendalam dalam struktur-struktur tradisional lanskap budaya di Sulawesi Tengah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan administrasi dan yurisdiksi serta "*den oeconomischen en socialen toestand der inheemische bevolking*"<sup>9</sup> (Loze 1929: suplemen 1) sekaligus menghindari intervensi-intervensi dengan kekerasan. Hal ini membutuhkan dukungan oleh pembangunan "*van de natuurlijke bronnen van welvaart des landes*"<sup>10</sup> (ibid.). Dengan penandatanganan *Korte Verklaringen, zelfbesturende landschappen* yang dibuat setuju untuk tidak menandatangani perjanjian-perjanjian dengan kekuasaan lain mana pun dan untuk mematuhi semua instruksi ratu Belanda atau pejabatnya (Spit, 1911: suplemen VII).

Sementara Kristenisasi, di bawah kepemimpinan misionaris Belanda Albert Christian Kruyt dan Nicolaus Adriani, dimulai pada tahun 1891 di bagian timur Sulawesi Tengah dan khususnya di wilayah sekitar Sungai Poso, penduduk pegunungan terpencil di bagian barat Sulawesi Tengah masih relatif tak terganggu. Kruyt dan Adriani juga termasuk di antara peneliti-peneliti kontemporer paling penting untuk wilayah selatan Palu. *De West-Toradjas op Midden Celebes* karya Kruyt, misalnya, yang diterbitkan pada tahun 1938, menyajikan sumber-sumber etnografis yang menarik untuk penelitian ini.

### *Era Kebijakan Etis*

Dua komponen penting menentukan fase terakhir pemerintahan kolonial Belanda. Di satu sisi, kebangkitan imperialisme pada akhir abad ke-19 menimbulkan pertanyaan apakah perluasan kekuasaan Belanda merupakan sebuah tindakan imperialistik atau bukan; di

<sup>9</sup> "status ekonomi dan sosial penduduk lokal".

<sup>10</sup> "sumber kemakmuran alam negara".

sisi lain, abad ke-20 memunculkan sebuah kebijakan etika baru yang unsur-unsurnya sangat penting bagi pembangunan di Sulawesi Tengah. Kebijakan etis ini secara kronologis terkait erat dengan upaya memperluas wilayah pengaruh. Fieldhouse (1965:167) memberikan tiga alasan untuk ekspansi ke pulau-pulau luar Jawa di Nusantara:

- 1) Serangan-serangan bajak laut membahayakan perdagangan, sehingga daerah-daerah yang sesuai harus diamankan oleh pasukan-pasukan militer yang ditempatkan secara lokal.
- 2) Gerakan-gerakan pemberontak para raja pribumi terus membahayakan stabilitas pulau-pulau
- 3) Kepentingan-kepentingan ekonomi Belanda meluas, yang menyebabkan pendudukan daerah-daerah yang kaya timah dan batu bara serta tanah yang cocok untuk budidaya kopi.

"Ekspansi ekonomi didorong oleh ekspor", kata Lindblad (1995:17), dan bertujuan untuk meningkatkan pilihan produk-produk ekspor. Doel (1994:96) mengomentari ekspansi ke luar Jawa:

Ekspansi dalam perdagangan luar negeri Indonesia luar biasa baik karena momentumnya yang kuat maupun durasinya yang luar biasa: sekitar seperempat abad ekspansi yang tidak terputus. Tak perlu dikatakan bahwa ekspansi ini memiliki sebuah dampak besar pada struktur ekonomi di daerah yang bersangkutan, khususnya di antara *Buitenbezittingen*. Produksi menjadi berorientasi pada ekspor luar negeri ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan *Buitenbezittingen* memperoleh posisi khas mereka sebagai penghasil-penghasil

utama devisa di kepulauan Indonesia, posisi yang sejak itu tumbuh permanen.<sup>11</sup>

Apa yang disebut kebijakan-kebijakan perdamaian di Aceh dan wilayah-wilayah lain di luar Jawa merupakan reorientasi dari kebijakan kolonial di Belanda. Pada tahun 1901, jurnalis J.P. Broosthofs menerbitkan sebuah pamflet berjudul "Program Etis dalam Kebijakan Kolonial", di mana dia menuntut sebuah rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap penduduk pribumi di koloni dan mengacu pada "*de edelmoedige drang van den sterkere om de zwakkere rechtvaardig te behandelen*"<sup>12</sup> (Locher-Scholten, 1981:177). Dua tahun sebelumnya, C.Th. van Deventer telah mengutuk eksploitasi koloni dalam artikelnya, "Een eereschuld", dan menuntut baik kompensasi finansial maupun moral (Wedema, 1998:1). Kedua publikasi ini membawa pada sebuah titik perubahan dalam kebijakan kolonial Belanda. Bahkan ketika ratu Belanda menekankan pertimbangan-pertimbangan etis dalam pidatonya tahun 1901 dari tahta, Parlemen juga memberikan ruang untuk pemikiran etis (Pangeran, 1996:35). Namun, khususnya di Luar Jawa, pembangunan daerah jajahan berdasarkan pengayaan dengan nilai-nilai barat harus didahului dengan pasifikasi, yaitu penaklukan militer dan pendirian sebuah administrasi Belanda.

*Max Havelaar*, sebuah novel terbitan Douwes Dekker dengan nama samaran "Mul-

<sup>11</sup> Menurut Madison (1990:326), surplus ekspor Hindia Belanda pada periode 1840–1869 (*cultuurstelsel*) jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, pada periode berikutnya (1870-1912) melebihi surplus yang dihasilkan oleh pesaing mana pun. Antara tahun 1913 dan 1938, surplus ekspor Hindia Belanda merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

<sup>12</sup> "dorongan murah hati dari yang lebih kuat untuk memperlakukan yang lebih lemah secara adil".

tatuli" mengancam situasi di daerah jajahan. Disamakan sebagai sebuah laporan orang dalam oleh seorang pejabat kolonial, novel ini mempercepat pengembangan sebuah kebijakan etis. Lingkaran akademis di Leiden di Belanda, yang anggota-anggotanya telah mendorong etika untuk membentuk sebuah bagian konstituen dari kebijakan kolonial, mengutip Dekker dengan preferensi. Namun, menurut Van Niel (1991:22), novel ini justru ditafsirkan secara tidak adil sebagai sebuah tuduhan terhadap sistem tanam paksa dan kolonialisme itu sendiri. Meskipun para penentang *cultuurstelsel* merujuk pada novel ini, Van Niel menunjukkan bahwa "orang kecil itu tidak lebih baik di bawah sistem pemerintahan yang baru; pada kenyataannya, banyak yang akan berargumen bahwa mereka menjadi lebih buruk" (ibid. ).

Jadi, apa sebenarnya inti dari kebijakan etis? Boomgard (1993:248) berkomentar bahwa tidak ada target-target yang ditetapkan dalam konteks ini mengenai pendapatan per kapita nasional, hasil padi per hektar atau tingkat kematian bayi. Para politisi malah menggunakan istilah samar *Volksverheffing* (mengangkat populasi dari keadaan mereka). Budidaya tanaman pangan yang cukup, menurut Prince (1995:35), adalah salah satu tugas-tugas utama dari kebijakan kesejahteraan ini: "Kami berharap untuk mencapai tujuannya dengan penelitian pertanian, dengan pendidikan pertanian dan dengan penyuluhan pertanian."

Aspek sentral lebih lanjut dari kebijakan ini adalah emansipasi<sup>13</sup> penduduk pribumi. Hal

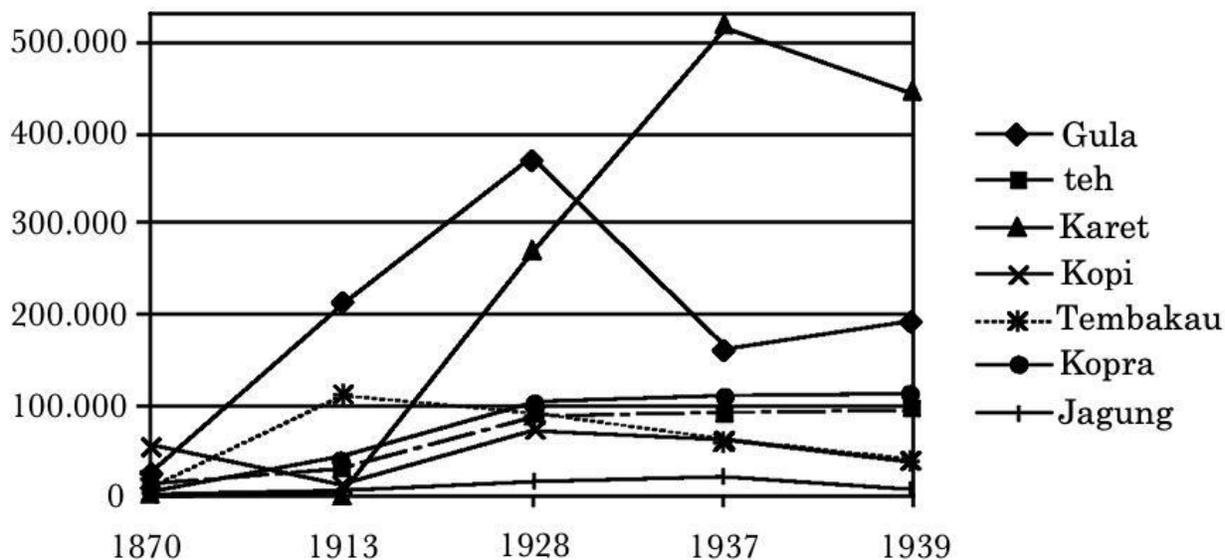
ini diharapkan dapat mengangkat elit lokal dari kepasifan mereka dalam bidang ekonomi dan politik dan memungkinkan partisipasi mereka yang lebih besar dalam kehidupan politik. Namun, emansipasi tersebut tidak boleh merusak kekuasaan Belanda (Wedema, 1998:2). Van Hinloopen Laberton menunjukkan isi kecil emansipatoris tentang kebijakan otonomi: "*De Zelfbesturen o.a. in Celebes zijn volgens hem, willoze automaten in de handen van een absoluut autocratisch bestuur. Hij noemt de Korte Verklaring een contract van schijn*"<sup>14</sup> (op cit., Loze, 1929:24).

Kebijakan etis dipahami sebagai bantuan pembangunan terhadap penduduk pribumi, sedangkan *Gidslandsgedachte*, konsep tentang sebuah bangsa pelopor, dikaitkan dengan sebuah keinginan Belanda untuk memelopori sebuah kebijakan etis Eropa (Wedema, 1998:18). Penduduk lokal Hindia Belanda harus dibimbing oleh sebuah negara kolonialis Eropa yang paling baik moralnya. Dengan Van Vollenhoven, yang menurut Kuitenbrouwer (1991:322) berusaha melegitimasi prosedur militer kekuasaan kolonial tentang penguasaan luar Jawa dengan perancangan negaranya sebagai "*Jeanne d'Arc* di antara bangsa-bangsa", kebijakan etis semakin dieksploitasi untuk mempertahankan sebuah citra tertentu bagi kebijakan kolonial Belanda.

<sup>13</sup> Menurut Dahm (1974), emansipasi berarti proses kesadaran penduduk kolonial, yang oleh pendidikan barat dan peningkatan sosial mengarah pada kesadaran persatuan terutama di kalangan elit mereka. Ini tidak sama dengan memperoleh kemerdekaan dalam arti anti-kolonial.

<sup>14</sup> "Pemerintahan sendiri, antara lain di Celebes, menurutnya, adalah mesin yang lemah di tangan administrator mandiri yang otokratis. Dia menyebut *Korte Verklaring* sebagai kemiripan kontrak."

Gambar 3: Ekspor Produk Pertanian Pilihan dari Hindia Belanda (harga konstan tahun 1929 dalam ribuan gulden)



Tahun-tahun awal abad ke-20 ditandai dengan sebuah ledakan produksi gula dan kopra (lihat Gambar 3), dan dengan demikian, memungkinkan penerapan parsial kebijakan etis. Situasi pemerintah kolonial, bagaimanapun, tumbuh semakin buruk setelah dekade pertama. "Indonesia koloni terikat dengan Belanda oleh beban utangnya", kata Prince (1996:67) menggambarkan situasi di awal tahun 1930-an. Barang-barang dari Hindia Belanda menjadi tidak menarik karena harganya yang tinggi di pasar dunia, sebagai akibat dari keterkaitannya dengan mata uang *gulden* Belanda. Bahkan memisahkan *gulden* Hindia Belanda dari mata uang Belanda tidak secara substansial mengubah situasi koloni. Karena fokus sepihaknya pada ekspor produk-produk dan sumber daya alam serta situasinya sebagai negara debitur, krisis ekonomi tahun 1929 sangat mempengaruhi koloni itu. Nilai-nilai ekspor turun lebih parah daripada nilai-nilai impor dan menyebabkan sebuah penurunan progresif nilai tukar perdagangan Hindia Belanda.

Bagian berikut akan menghubungkan perubahan-perubahan politik dan ekonomi secara keseluruhan di Belanda dan di Hindia Belanda dengan dampak-dampaknya terhadap lanskap budaya dari daerah yang diselidiki.

### Penaklukan Belanda dan Pengaruhnya terhadap Lanskap Budaya *Onderafdeeling* Palu

Pada awal abad ke-18, *magau* (raja) Palu sudah meminta intervensi VOC terhadap perompak Mandar. Menurut Acciaioli (1989: 76), orang Mandar menghancurkan wilayah Palu sedemikian rupa sehingga tidak cukup minyak kelapa dapat diproduksi lagi untuk membayar upeti-upeti kepada Pemerintah di Makassar.

Terlepas dari ketergantungan awal Palu vis-à-vis dengan penguasa-penguasa Belanda dan meskipun fakta bahwa Palu telah secara resmi disubordinasikan ke Belanda pada tahun

1864<sup>15</sup> (*Atlas van Tropisch Nederland*, 1938: lembar 10a), penaklukan langsung dan administrasi Belanda selanjutnya atas daerah itu terjadi pada awal abad ke-20 setelah ekspansi etis dan politik bantuan pembangunan. Pada tahun 1888, Sulawesi Tengah dilindungi dari Inggris (Coté, 1996:93). Di wilayah Teluk Palu, seorang *Posthouder*<sup>16</sup> dipekerjakan di Donggala pada tahun 1891. Dua tahun kemudian, *afdeeling Paloebaai* didirikan, dan dua tahun kemudian *Posthouder* digantikan oleh seorang *Civiele Gezaghebber*. *Afdeeling Midden-Celebes* didirikan pada tahun 1904 yang terdiri dari distrik Pantai Barat Midden-Celebes, Palu, Poso dan Parigi.<sup>17</sup> Donggala dan Tawaelia berada di bawah pengawasan *Controleur* di Donggala, sedangkan wilayah selatan Teluk Palu (Palu, Sigi-Biromaru, Dolo dan Kulawi) diperintah oleh *Controleur* Palu (Acciaoli, 1989:73f). Sementara raja Sigi telah menandatangani *Korte Verklaring* pada tahun 1904, Palu, Dolo dan Biromaru menyusul satu tahun kemudian (Hissink, 1909:95).

Belanda mencoba menaklukkan Lembah Kulawi pada tahun 1905 tetapi gagal meng-

<sup>15</sup> Karesidenan Manado sebagai bagian utara Sulawesi didirikan pada tahun 1824 sebagai bagian dari Pemerintah Kepulauan Maluku. Setelah Belanda melepaskan monopoli perdagangan rempah-rempah di provinsi-provinsi utara, ia menjadi unit administratif yang independen pada tahun 1865 (Leirissa, 1996:267).

<sup>16</sup> pemegang kota.

<sup>17</sup> Pada tahun 1910, *afdeeling Midden-Celebes* yang direorganisasi terdiri dari 34 landschappen berikut: *Westküste Midden-Celebes*: Banawa, Tawaeli, Toli-Toli; Palu: Palu, Biromaru, Sigi, Dolo, Kulawi, Lindu, Tobaku, Benasu; Poso: Todjo, Lage, Ondu, Palandu dan Lamusa, Bantjea dan Puumboto, Pebato, Napu, Besoa, Tawaelia, Bada, Uma-Uma, Batudaka, Bobongko und Malenge, Walea kecil, Walea besar, Togean; Parigi: Parigi, Sausu, Moutong, Toribulu, Kasimbar, Sigenti, Ampibabo (MMK 303:12f).

alahkan penduduk pribumi Kulawi yang mempertahankan tanah mereka selama perang di Gunung Momi, perbatasan geografis antara Palu dan Lembah Kulawi. Akhirnya tentara Belanda, yang sebagian besar terdiri dari tentara Minahasa dari Sulawesi Utara, berhasil memasuki Kulawi melalui Sungai Miu pada tahun 1906. Pengambilalihan kontrol berikutnya di Kulawi terjadi tanpa insiden-insiden yang lebih besar karena orang Kulawi menyerah setelah raja Towoalangi menyubordinasikan dirinya kepada Belanda (Pamei, 1997:6 dst). Pada tahun 1908, kerajaan-kerajaan di selatan Palu menandatangani *Korte Verklaringen*. Dengan melakukan hal itu, jalan bagi perubahan-perubahan Belanda di wilayah itu terbuka lebar.

Setelah penaklukan, para misionaris, belatentara, ilmuwan-ilmuwan alam dan para antropolog melakukan perjalanan ke wilayah ini. Para misionaris seperti Woodward atau Loois mempelajari bahasa-bahasa dan budaya-budaya setempat. Perwira Angkatan Darat Hissink menyelidiki daerah sekitar Sungai Palu dan ke selatan sampai Sungai Koro, sementara Kapten Boonstra van Heerdt sibuk mencari sumber dari kedua sungai itu. Ahli geologi Abendanon mempelajari Sulawesi Tengah pada tahun 1909 dan 1910. Setahun kemudian, Grubauer melintasi wilayah itu datang dari Poso melalui Gimpu (Kulawi) ke Palu. Kemudian, seorang Amerika, Raven mulai berurusan dengan koleksi zoologi daerah Lindu, Kulawi dan Gimpu. Sarasin bersaudara, dua ilmuwan alam, memetakan aliran air di sepanjang garis yang disebut garis Sarasin dari Palu di Utara hingga Palopo di Selatan. Menurut Kaudern (1925:30), mereka adalah orang-orang Eropa pertama yang mengunjungi Gimpu, Bada dan Lebone.

Pada paruh kedua abad ke-19, para pejabat kolonial di Belanda harus mengakui bahwa

mereka semakin mendapat informasi yang buruk tentang keadaan dan perkembangan-perkembangan di wilayah-wilayah jajahan kepulauan Indonesia (Boomgard, 1991:24). Ini bukan kelemahan teknologi sejak perkembangan navigasi (kapal-kapal uap dan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869) jika ada yang mempercepat komunikasi antara Belanda dan koloni. Sebaliknya, masalahnya berakar pada pemerintah kolonial di Batavia, yang mulai memerintah tanpa mempertimbangkan kepentingan Belanda (lihat Cribb, 1994). Para penjajah hanya peduli dengan kepentingan-kepentingan keuangan mereka sendiri.

Untuk mengatasi peningkatan kemerdekaan Hindia Belanda ini, Kementerian Kolonial mengeluarkan pernyataan pada tahun 1867 yang mengharuskan administrator-administrator kolonial untuk mengirimkan laporan-laporan berkala tentang situasi di koloni ke Den Haag. Dua tahun kemudian, peraturan pemerintah yang baru ini diterapkan. Surat-surat ini dikirim dari Batavia ke Den Haag, yang sekarang menjadi bagian dari sumber penting untuk penelitian ilmiah. Sumber tersebut adalah apa yang disebut *Memorie van overgave*, laporan para gubernur, penduduk dan para pengawas dari masing-masing wilayah administrasi nusantara yang ditulis oleh masing-masing pejabat sebagai sebuah laporan untuk para penerus mereka setelah meninggalkan kantor. Melalui *Memorie* tersebut, Den Haag terus diberitahu tentang status quo dan belajar tentang perubahan-perubahan misalnya infrastruktur, permukiman-permukiman, kependudukan, migrasi, ekonomi, perdagangan dan agama di daerah masing-masing. Dengan demikian, sumber-sumber tersebut memberikan gambaran yang efektif tentang intervensi-intervensi kolonial terhadap struktur penduduk dan lanskap budaya di Sulawesi Tengah bagian barat pada

awal abad ke-20 (lihat Weber, 2000).

Pengaruh-pengaruh kolonialisme dapat dideteksi di *onderafdeeling Palu* di hampir semua wilayah lanskap budaya (lihat Tabel 2). Pemerintah kolonial Belanda juga telah memberikan pengaruhnya di bidang-bidang kehidupan sosial seperti agama, pendidikan dan perawatan kesehatan. Yang terakhir ini tidak mengejutkan mengingat kebijakan etis awal abad ke-20 yang dijelaskan di atas dan tuntutan-tuntutannya akan bantuan pembangunan klasik. Secara spasial, masa penjajahan Belanda paling kuat mempengaruhi wilayah pesisir utara dan Lembah Palu. Wilayah Kulawi di selatan serta daerah-daerah pegunungan juga terpengaruh oleh tindakan-tindakan kolonial. Menurut Acciaioli (1989: 83f), daerah di sekitar Danau Lindu tetap relatif terisolasi meskipun ada modifikasi-modifikasi substansial di pedesaan sekitarnya yang terjadi selama pemerintahan Belanda dan setelah kemerdekaan Indonesia.<sup>18</sup>

Dampak-dampak yang paling penting dapat dilihat dalam pertanian, khususnya sistem irigasi yang kompleks, serta dalam migrasi dan lalu lintas. Namun, ada banyak pertukaran antara proses-proses modifikasi kolonial, sehingga kesulitan untuk membuat sebuah sistematisasi yang terang.

#### *Perluasan dan Intensifikasi Penggunaan Lahan Agraria*

Menurut Kruyt (1903:91) penduduk Sulawesi Tengah tidak tersebar sangat padat. Cukup banyak orang bermukim di Lembah Palu. Namun hal ini tidak menyebabkan kelebihan penduduk karena produksi sawah yang sudah ada. Hart (1853:264) mengatakan hal berikut tentang Lembah Palu: “*Het land*

<sup>18</sup> Untuk efek penaklukan Jepang (1942–1945), lihat Weber (2000).

*vertoont zich zeer vruchtbaar en wanneer de grond goed bewerkt wird, zoude hij ruimer voorraad, dan nu, van allerlei aardgerwassen en vruchten kunnen voortbrengerwest, aan tropischegen.*"<sup>19</sup> Namun, menurut Hart, penduduk pribumi malas dan lamban dan hanya melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Wichmann (1890:984f) juga menggambarkan kesuburan lembah tetapi menyangkal sebuah "sifat buruk" penduduk pribumi. Berbeda dengan Jawa atau Sumatra, produksi pertanian tidak melibatkan perkebunan-perkebunan di bawah pengaruh Belanda. Sebaliknya, struktur-struktur kepemilikan lama sebagian besar dipertahankan dan manfaat-manfaatnya diraup Belanda terutama terdiri dari kerja paksa untuk pembangunan jalan atau melalui pemungutan pajak.

Di bidang pertanian, sifat kebijakan kolonial dan terutama fokusnya pada produksi untuk ekspor yang dilakukan di beberapa tempat. Kekuasaan kolonial memulai sebuah irigasi skala besar di sawah-sawah lama dan perluasan total area produksi (lihat Gambar 4). Berbeda dengan penduduk-penduduk di wilayah Poso, cara bercocok tanam padi sudah dikenal baik oleh penduduk di Sulawesi Tengah bagian barat sebelum kedatangan Belanda, seperti yang ditunjukkan oleh Valentyn (1724:74f). Menurut Metzner (1981: 47), pengenalan teknik sawah sudah ada sejak kehadiran para pendatang Bugis. Budidaya sawah juga dilakukan dalam adat setempat (KTLVK, 1911:30f). Untuk meningkatkan keefektifan, Belanda secara gencar mempromosikan bajak dari tahun 1930-an dan seterusnya (KIT 1203:20), tetapi penggunaan

<sup>19</sup> "Tanah itu tampaknya sangat subur, dan ketika tanah itu diolah, berbagai macam tanaman yang berbeda, seperti biasa untuk daerah tropis, akan dapat dipanen."

teknik ini berlangsung lambat (KIT 1206:9).

Karena di banyak daerah persediaan air yang tidak mencukupi merupakan hambatan utama untuk sebuah perluasan produksi pertanian yang cepat, proyek-proyek irigasi yang ambisius seperti yang dilakukan Fenger Petersen dibangun di wilayah sungai Gumbasa, Wunu dan Paneki di sisi timur dataran Palu pada awal 1930-an.<sup>20</sup> Proyek-proyek tersebut, seperti halnya di daerah-daerah lain, terhambat oleh kebutuhan untuk berhemat, yang menyebar ke seluruh wilayah kolonial karena krisis ekonomi tahun 1930-an (lihat KIT 1202:34). Namun demikian usaha-usaha telah dilakukan untuk meningkatkan produksi setinggi mungkin karena "*de bevolking kan nu thans sawahs aanleggen een rijst verbouwen op plaatsen waar dit te vonen door uitdroging van de natuurlijke waterlopen niet meer mogelijk is*"<sup>21</sup> (KIT 1203:20).

Pada tahun 1924, seorang sersan ditugaskan untuk merawat orang-orang berbahasa Da'a di pegunungan sebelah barat Palu. Di bawah bimbingannya, kompleks sawah besar dibangun antara desa Bobo dan Sidondo untuk mendapatkan pendapatan pajak dari hasil panen (Kruyt, 1926:543).

"[...] areal kelapa yang sangat luas telah ditanam di Sulawesi (Sulawesi)", tegas Barlow (1989). Hengel (MMK 303:26) mencatat pada tahun 1910 bahwa perkebunan-perkebunan kelapa juga meningkat di *afdeeling Donggala*. Pohon-pohon kelapa sudah ada terutama di

<sup>20</sup> Rencana Fenger Peterson, yang akhirnya dilaksanakan dalam skala yang lebih kecil, bertujuan untuk mengubah seluruh wilayah antara sungai-sungai tersebut di atas menjadi sawah (KIT 1206:32f).

<sup>21</sup> "Masyarakat dengan demikian dapat membuka sawah dan menanam padi di tempat-tempat yang tidak memungkinkan lagi karena mengeringnya aliran air alami."

Lembah Palu (Hissink, 1909:121). Budidaya pohon kelapa sangat dipengaruhi oleh lonjakan harga produk ekspor kopra sebagai "*kopra is een voornaam artikel van uitvoer*"<sup>22</sup> (Hissink, 1909:121). Pemerintah kolonial menetapkan bahwa setiap rumah tangga harus menanam 50 pohon kelapa. Dengan bertambah setiap anak keluarga, jumlah ini bertambah 10 pohon pohon lagi (MMK 303:26). Hal ini menggambarkan kebijakan picik yang menghubungkan peningkatan produksi dengan situasi di pasar global. Akibatnya, penduduk sering dihadapkan dengan perintah-perintah baru untuk mengubah produksi. Keterkaitan dengan pasar dunia ini juga menyebabkan penduduk lokal mengabaikan produksi subsisten, yang juga diperhatikan oleh Belanda: "*Voor een blijvende vooruitgang in de voedselcultuur in de Residentie Manado is het noodzakelijk, dat de sawahs uitgebreid worden*"<sup>23</sup> (MMK 308:43). Keberhasilan produksi ekspor pertanian dianggap sangat bergantung pada kesehatan penduduk. Penanggulangan epidemi dan penyakit menular adalah salah satu target terpenting dari kebijakan kesehatan masyarakat kolonial. Obat-obatan melawan malaria, yang merupakan masalah utama di dataran rendah, dan penyakit tropis lainnya, disediakan oleh Belanda (Grubauer, 1913:557f).

Monetarisasi progresif (Jäckel, 1990:113) yang muncul dari tumbuhnya anonimisasi dan sentralisasi kekuasaan (Kruyt, 1929) membuat penduduk semakin bergantung pada ekonomi kapitalis yang menggerogoti ekonomi subsisten tradisional, tetapi tidak menghancurkannya sama sekali. Contoh *onderafdeeling Palu* menunjukkan apa yang secara umum diamati Suryo (1987: 275) untuk Hindia Belanda:

<sup>22</sup> "kopra adalah produk ekspor utama."

<sup>23</sup> "Untuk menjaga persediaan pangan di Residentie Manado perlu dilakukan perluasan sawah."

"Pembangunan pedesaan pada masa kolonial adalah untuk menguntungkan pemerintahan kolonial dan bukan kesejahteraan masyarakat adat." Analisis terhadap sumber-sumber mengungkapkan bahwa gambaran positif Kolff (1929:116 dst) harus diperlakukan dengan hati-hati, setidaknya berkenaan dengan wilayah studi kasus, karena para petani kecil swasta di pulau-pulau luar Jawa<sup>24</sup> sangat bergantung pada ekspor.

Selain padi, jagung dibudidayakan di bawah Belanda sebagai tanaman tahunan. Pemerintah kolonial mempromosikan penanaman jagung di sawah yang sudah dipanen "*opdat op deze wijze grootere inkomsten uit den grond worden verkregen*"<sup>25</sup> (KIT 1206:8). Sistem tumpang sari ini menjadi semakin penting.

Produksi garam juga menjadi sebuah peran dalam kebijakan ekonomi kolonial daerah (MMK 304:73; KIT 1198:1 ff). Ini sebagian tumpang tindih dengan penanaman pohon kelapa, yang didorong oleh kenaikan harga kopra. Upaya-upaya besar dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk mempromosikan produksi garam. Ini bergantung pada penempatan pabrik-pabrik di tempat yang berbeda, sehingga variasi-variasi lokal dapat dimanfaatkan untuk menjamin hasil garam yang relatif terus menerus sepanjang tahun.

Banyaknya jumlah kambing dan domba yang dipelihara di *onderafdeeling Palu*, menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi penduduk pribumi, terutama setelah jatuhnya harga kopra pada tahun 1930. Iklim dan

<sup>24</sup> Menurut Kolff (1929:117), proporsi hasil ekspor dari pertanian lokal di luar Jawa meningkat dari 10 juta gulden pada tahun 1894 menjadi 350 juta gulden per tahun selama periode 1925–1927. Jumlah yang sesuai untuk Jawa adalah 7 dan 88 juta gulden.

<sup>25</sup> "agar mendapatkan hasil yang lebih besar dari tanah".

vegetasi lokal di Lembah Palu menurut pemerintah kolonial adalah ideal (MMK 308:79).

### *Reboisasi dan Hutan Lindung*

Pada tahun 1919, pemerintah kolonial memerintahkan agar seorang jagawana memeriksa jumlah hutan di residensi Manado. Di *onderafdeeling* Palu, tiga polisi hutan dipekerjakan pada tahun 1926. Belanda sangat tertarik untuk mencari jati (MMK 305: 128). Penguasa-penguasa kolonial juga menghadapi masalah peningkatan deforestasi di pegunungan sekitar Lembah Palu akibat metode tebang dan bakar dan perladangan oleh penduduk pegunungan (MMK 305:128f). Deforestasi menyebabkan pengurangan debit air yang tersedia untuk daerah-daerah sawah yang luas di lembah (KIT 1203:15). Dataran Palu yang dulu subur menjadi sebagian besar daerah kering yang ditutupi oleh kaktus. Areal persawahan dan jalur jalan di lembah terancam banjir (MMK 305:134).

Laporan-laporan para polisi hutan menunjukkan bahwa tidak ada kawasan-kawasan yang lebih luas yang menguntungkan untuk eksploitasi kayu. Kayu bangunan bagaimanapun juga memiliki harga yang sangat rendah di pasar dunia. Ebony hanya ditemukan di *onderafdeelingen* tetangga Donggala, Parigi, Poso dan Bolaang Mongondow. Karet dan rotan masih ada dalam jumlah besar di wilayah-wilayah pegunungan yang sulit dijangkau, tetapi hampir hilang seluruhnya di daerah-daerah pesisir (MMK 305:129).

Hasil-hasil tersebut adalah landasan untuk beberapa pengaturan:

- Hutan pegunungan di sekitar kawasan-kawasan budidaya harus dilindungi dari deforestasi; jika pohon-pohon ditebang di

perbukitan, yang membahayakan pasokan air untuk pertanian di dataran, maka harus dilakukan reforestasi.

- Untuk memberi informasi kepada penduduk lokal dan petugas kolonial, area-area tersebut harus ditandai.

- Di dalam batas-batas tersebut, tidak ada lagi pohon-pohon yang boleh ditebang untuk budidaya ladang.<sup>26</sup> Semua kawasan hutan di tanah-tanah yang bagus yang terletak di luar batas-batas tersebut harus digunakan untuk budidaya.

- Berbeda dengan eksploitasi hutan oleh pemerintah, eksploitasi hutan oleh sektor swasta harus didukung semaksimal mungkin, tetapi pemerintah pusat dan daerah harus diberi bagian yang sah.

- Eksploitasi rotan atau karet<sup>27</sup> harus berkelanjutan.

- Peremajaan dan penghutanan kayu berkualitas tinggi yang penting untuk perdagangan (misalnya kayu hitam) harus dipercepat, sedangkan kayu-kayu bangunan hanya menjamin pasokan untuk kebutuhan-kebutuhan lokal.

- Jalan-jalan dan jalur-jalur setapak harus dibangun untuk memfasilitasi akses ke kawasan-kawasan hutan tertentu (MMK 305:129 dst).

Sayangnya, data arsip tidak menyediakan gambaran-gambaran rinci tentang hasil-hasil dari rencana-rencana tersebut. Program penghijauan dimulai pada tahun 1923, dan diperluas hingga tahun 1926 (MMK 305:134).

<sup>26</sup> Pembatasan-pembatasan tersebut bertentangan dengan hak-hak adat tradisional, yang juga mengatur akses ke tanah yang subur (KTLVK 1911:130f).

<sup>27</sup> Ekspor karet dari *onderafdeeling Palu* meningkat dari tahun 1932 ke 1934 sebesar 50 persen (KIT 1203:24). Harga rotan baru bagus pada tahun 1933 dan awal tahun 1934. Setelah itu, harga produk ini turun lagi.

Belanda memasang batas-batas hutan lindung di sepanjang pegunungan sebelah timur dan barat Lembah Palu (KIT 1203:15). Di wilayah Kulawi, Rio dan Palentuma, sebuah areal hutan lindung tidak diperlukan karena rasio manusia dengan hutan dinyatakan seimbang (ibid.).

Reboisasi dianggap sama pentingnya dengan program-program irigasi (KIT 1198: 17f). Jika penghijauan lereng-lereng berhasil, "*dan zal een prachtig bebouwbaar areaal kunnen worden verkregen en Paloe zal weer wor den het land van melk en honig' waarover Valentijn reeds spreekt*"<sup>28</sup> (KIT 1198:18).

*Memorie-Memorie* itu juga menyampaikan pernyataan-pernyataan salah satu pejabat kolonial yang mengkritik program penghijauan dan pelestarian hutan yang terlalu mengabaikan kebutuhan-kebutuhan penduduk setempat. Pemerintah menjawab kritik-kritik tersebut dengan memperluas program-program dan pembatasan-pembatasan (KIT 1202: 39).<sup>29</sup> Sebagai sebuah contoh tentang perpaduan antara upaya-upaya eksploitasi hutan dan reboisasi, Kruyt (1926:543) menyebutkan bahwa pada tahun 1926 semua orang berbahasa Da'a dari Pekawa sampai perbatasan *onderafdeeling* Donggala terpaksa memungut rotan, karena mereka masih harus membayar pajak sekitar 100.000 gulden. Selain itu, mereka harus bekerja<sup>30</sup> di daerah-daerah penghijauan dua kali setahun (Kruyt, 1926:544). Upaya ini menunjukkan bentuk eksploitasi terhadap penduduk lokal.

<sup>28</sup> "Kalau begitu, lahan pertanian yang bagus akan tersedia dan Palu akan kembali menjadi tanah susu dan madu yang sudah dibicarakan Valentyn."

<sup>29</sup> Pemerintah juga bereaksi dengan menyensor bagian-bagian *memorie van overgave* petugas tersebut.

<sup>30</sup> Para pekerja dibayar dengan jagung.

### *Dampak Kolonial pada Migrasi*

Pemukiman-pemukiman kembali yang diprakarsai oleh Belanda seperti migrasi antar pulau atau migrasi lokal akan diuraikan di bawah ini.

Pemukiman-pemukiman kembali penduduk pegunungan secara paksa telah dilakukan mendahului reboisasi-reboisasi selama fase-fase awal pengaruh kolonial, terutama yang diturunkan dari pegunungan di sebelah barat dataran Palu ke lembah. Adriani menekankan dorongan ekonomi dari modifikasi-modifikasi kolonial tersebut dan membedakannya dari dorongan etis:

*Een tweede, zeer belangrijke maatregel was het stichten van nieuwe dorpen. Binnen het grondgebied van de stam moesten alle dorpen van hunne heuveltoppen alkomen en herbouwd worden op vlakke, althans toegankelijke plaatsen, in de nabijheid van water en zóó, dat de groote weg, die door het gebied van den stam wird aangelegd, geen groote bochten behoefde te maken om alle dorpen van den stam te doorsnijden. Alle doorzettingskracht van den heer Mazee en alle overredingskracht der Zendelingen is noodig geweest, om te zorgen dat dit gebeurde.* (Adriani, 1915:469)<sup>31</sup>

<sup>31</sup> "Aturan kedua yang sangat penting adalah pembangunan desa baru. Di dalam wilayah suku, semua desa harus dipindahkan dari puncak bukit dan dibangun kembali di tempat yang datar atau paling tidak terjangkau di dekat aliran air, sehingga jalan yang akan dibangun melewati wilayah suku, tidak harus melewati tikungan yang terlalu banyak untuk melewati semua desa suku. Semua kegigihan Mr Mazee dan semua bujukan misi diperlukan untuk mewujudkannya."

Tujuannya adalah untuk memukimkan orang-orang di wilayah dataran dan mengolah sawah-sawah. Ketika Belanda akhirnya menyadari bahwa penduduk pegunungan tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan di lembah, mereka mengizinkan mereka untuk kembali ke wilayah-wilayah pegunungan, tetapi bukannya tanpa memperkenalkan pembatasan-pembatasan hutan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Migrasi-migrasi semacam ini lebih banyak terjadi di sisi barat Lembah Palu dibanding di sisi timur.

Mengapa orang-orang lebih dulu menetap di wilayah-wilayah pegunungan dan bukan di wilayah-wilayah dataran rendah yang medannya membuat budidaya pertanian lebih mudah? Salah satu alasannya mungkin dapat ditemukan dalam mitos-mitos tentang asal-usul yang tidak membicarakan tentang daerah pantai sebagai sebuah titik awal asal-muasal kelompok etnis mereka tetapi menyebutkan "semacam asal-usul kesukuan di wilayah-wilayah pegunungan" (Reid, 1997:61).<sup>32</sup> Namun, sebuah perbedaan harus dibedakan antara kelompok-kelompok maritim seperti orang-orang Bugis, Makassar atau Mandar yang berasal dari Sulawesi Selatan di satu sisi dan orang-orang Kulawi atau Kaili di Sulawesi Tengah. Menurut Reid (1997:78) alasan-alasan yang berbeda untuk etnogenesis ini dapat ditemukan: bahaya banjir, budidaya padi sawah yang padat tenaga kerja, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak

<sup>32</sup> Lihat [Coté \(1979\)](#) untuk wilayah Poso. Sulawesi Tengah bukanlah satu-satunya wilayah di Indonesia yang penduduknya pertama kali bermukim di dataran tinggi seperti yang dikatakan Reid: "Selama pertumbuhan penduduk yang pesat pada abad kedua puluh, migrasi yang paling signifikan di Indonesia bukanlah dari dataran rendah ke dataran tinggi yang jarang penduduknya, seperti yang telah menjadi ciri khas di Cina dan Vietnam [...], tetapi sebaliknya" (1997:62).

bersih seperti kolera atau tifus atau posisi strategis di wilayah-wilayah pegunungan jika terjadi peperangan yang menyebabkan orang memilih untuk menetap di pegunungan.<sup>33</sup>

Belanda tampaknya memiliki tiga tujuan ketika memukimkan kembali orang-orang dari pegunungan di lembah: mereka berharap dapat mencegah deforestasi lebih lanjut; untuk alasan-alasan politik agar mereka lebih mudah mengatur rakyat dengan memusatkan distribusi penduduk hanya di beberapa desa;<sup>34</sup> dan untuk menggerakkan ekonomi pertanian lembah untuk menanam sawah.

Orang-orang dari pemukiman-pemukiman pegunungan di sebelah barat Lembah Palu (daerah Pekawa atau Mamerak) dimukimkan kembali di dataran, mis. ke Sambo dan Bobo (KIT 1203:26; Kruyt, 1926:542). Para migran hampir tidak mampu mengatasi kondisi baru mereka di dataran rendah. Kondisi iklim terutama mendorong sebagian besar di antara mereka kembali ke wilayah-wilayah pegunungan. Belanda mencatat lebih banyak terjadi kasus kematian daripada kelahiran.<sup>35</sup> Semua upaya Belanda, seperti pendirian barak-barak kesehatan untuk orang-orang sakit atau pencegahan-pencegahan penularan penyakit

<sup>33</sup> Penjelasan Reid ini melewati sebuah jawaban atas pertanyaan mengapa kelompok-kelompok etnis lain memilih dataran rendah untuk pemukiman-pemukiman mereka jika ada begitu banyak alasan yang menentang pilihan ini. Orientasi kelautan dari kelompok-kelompok penduduk seperti Bugis bisa menjadi salah satu contohnya.

<sup>34</sup> Kruyt (1938, Vol. 1:501) menyebutkan sebuah ketidaktahuan penduduk gunung dan kehidupan mereka bersama di pemukiman-pemukiman yang lebih besar.

<sup>35</sup> Kruyt (1926:542) menyatakan bahwa mungkin ada sebuah korelasi antara kondisi fisik yang buruk dari banyak orang pegunungan dengan akibat-akibat epidemi disenteri berat di mana ratusan orang meninggal.

(Kruyt, 1926:543), tidak membantu mempertahankan orang-orang tersebut di dataran. Perwira Belanda Vorstman menyatakan, mungkin didorong oleh kebijakan etis: "*Men zou deze zielige menschen dan ook graag naar hun bergen laten terugkeeren*"<sup>36</sup> (KIT 1203:13). Sebuah pernyataan kedua Vorstman menyatakan kesedihannya terhadap penduduk dataran tinggi ke dalam perspektif: "*Ik heb de menschen alle vrijheid gegeven, die ik ze kon laten, maar de belang van de 10 maal talrijker vlakke bevolking gaan boven die van enkele bergbewoners*"<sup>37</sup> (ibid.). Namun, para migran diizinkan untuk menetap di daerah-daerah sebelum kawasan hutan, meskipun pemungutan pajak menjadi lebih sulit. Hanya Bobo<sup>38</sup> yang tinggal dihuni oleh para pendatang dari pegunungan (Kruyt, 1926:543). Sampai tahun 1936, hanya sebagian kecil penduduk pegunungan yang terkonsentrasi di desa-desa (KIT 1203:13). Meskipun pemerintah kolonial Belanda berusaha untuk tetap mengontrol distribusi penduduk dataran tinggi, tidak ada upaya-upaya pemukiman kembali yang serius yang dilakukan (Kruyt, 1926:544).

Sebuah kasus pemukiman kembali lokal secara tidak langsung dilaporkan terjadi di desa Rarangunau (sebelah timur Biromaru). Setelah membuat hutan lindung yang sangat penting untuk pasokan air untuk sistem irigasi Paneki dan Sungai Wunu, tidak ada lagi lading-ladang yang diperbolehkan untuk dibuka. Dengan demikian, para warga harus

meninggalkan desa. Karena para warga tidak ingin menetap di Lembah Palu, mereka memutuskan untuk menuju ke Parigi (KIT 1203:13). Sulit untuk menilai seberapa besar pihak Belanda memaksa para migran untuk mengambil keputusan ini karena sumber-sumbernya tidak memiliki informasi tabahan.

Imigrasi dari pulau-pulau lain di Sulawesi di bawah tekanan colonial tidak terdokumentasi di dalam sumber-sumber data.<sup>39</sup> Untuk administrasi, Belanda menggunakan orang Bugis dari Sulawesi Selatan karena mereka "diakui sebagai penyeimbang politik terhadap raja-raja Kaili pribumi yang nakal"<sup>40</sup> (Acciaioli 1987:4). Karena orang-orang Bugis sudah bermukim di bagian utara dataran Palu sejak abad ke-18 (KIT 1206:6), menggambarkan sebuah pusat Muslim di *landschap* Sigi-Dolo,<sup>41</sup> tampaknya cukup jelas bahwa Belanda tidak mempengaruhi migrasi orang Bugis, setidaknya secara langsung. Kelompok penduduk ini telah memegang sebagian besar jabatan-jabatan bangsawan di dataran rendah Sulawesi Tengah sebelum kedatangan Belanda (lihat Kruyt 1938, vol. 1). Kekuasaan kolonial memaksakan kontrol tidak langsungnya terhadap penduduk pribumi di setiap *land-schappen* melalui otonomi, yang bersandar pada para aristokrasi tersebut. Sistem pemerintahan tidak langsung tersebut memungkinkan Belanda untuk menarik keuntungan

<sup>36</sup> "Kami kemudian harus membiarkan orang-orang ini kembali langsung ke gunung mereka."

<sup>37</sup> "Saya telah memberi orang-orang ini semua kebebasan yang dapat saya berikan kepada mereka, tetapi kebutuhan-kebutuhan penduduk dataran yang 10 kali lebih besar melampaui kebutuhan-kebutuhan penduduk pegunungan."

<sup>38</sup> Sumber-sumber tidak memberikan petunjuk-petunjuk tentang alasan mereka tetap tinggal di Bobo.

<sup>39</sup> Orang-orang Minahasa, yang dipekerjakan di pemerintahan Sulawesi Tengah karena kesetiaan mereka, sudah lebih dulu mengabdikan kepada Belanda.

<sup>40</sup> Pernyataan Acciaioli ini didasarkan pada Masyhuda dkk. (1977). Menurut buku ini (Vol. 1:45), Petta Lolo, seorang bangsawan Bugis, dicalonkan oleh Belanda menjadi walikota Donggala, Teluk Palu bagian barat.

<sup>41</sup> Di bawah pengaruh Bugis, semua orang Sulawesi Tengah yang berbahasa Kaili menyebut diri mereka Muslim, namun hanya beberapa desa di Sigi-Dolo yang menampung Muslim yang setia (KIT 1206:6).

maksimum dari wilayah jajahan dengan penempatan personil dan beban keuangan yang minimum dengan mengharuskan setiap *landschappen* menjadi mandiri. Selama masa krisis, terutama selama tahun 1930-an, struktur politik di Sulawesi Tengah ini setidaknya memungkinkan dipertahankannya status quo ekonomi.

Imigrasi dari pulau-pulau lain di nusantara bersifat terbatas.<sup>42</sup> Sebuah rencana pemukiman kembali yang ditetapkan, misalnya, mencakup Kalawara naputih (Lembah Palu), di mana orang-orang Jawa mulai menetap sejak tahun 1906 (MMK 303:21). Tak lama setelah Belanda mengambil alih pemerintahan daerah, sebuah koloni pertanian Jawa Kristen didirikan di bawah kendali Bala Keselamatan, yang jumlahnya meningkat dari 69 menjadi 208 orang antara tahun 1922 dan 1928 (MMK 304:43; Metzner, 1981:51).

Di bawah pengaruh kebijakan etis, transmigrasi dari Jawa tersebut dapat dipahami sebagai proyek bantuan pembangunan. Para pemukim harus mewariskan pengetahuan pertanian mereka kepada penduduk-penduduk pribumi dataran Palu yang berpenduduk sedikit, terutama dalam penanaman padi (Encyclopaedie, 1921, Bd. 2:257). Para penjajah memperoleh, misalnya, perintah untuk mendukung orang-orang berbahasa Da'a dalam membangun kompleks sawah besar di dataran Palu (lihat Bab 3.1) Tetapi proyek itu gagal, paling tidak karena eksploitasi para pemukim oleh Bala Keselamatan dan keengganan mereka untuk bergaul dengan penduduk pribumi (MMK 305:91). Bala Keselamatan memiliki semua pohon kelapa dan kopi dan para pemukim hanya mendapat sebidang kecil

tanah sawah dan beberapa ekor sapi. Mereka harus bekerja hingga tiga hari seminggu, hanya dibayar sebagian, di ladang misionaris. Akibatnya, proyek-proyek lanjutan semacam ini tidak diperkenalkan. Karena para pemukim tidak puas, beberapa dari mereka pindah ke desa lain di Lembah Palu (misalnya Sibalaya, Sibowi) dan menjadi sukses. Sebagian lagi menjadi pembantu di rumah-rumah di kota Palu. Sisanya menjadi miskin (KIT 1203:28f). Tidak ada implementasi lain dari program transmigrasi seperti ini yang dilaporkan dalam sumber-sumber informasi tentang daerah penelitian ini.

#### *Kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Misionaris*

Untuk menumbuhkan elit administrasi lokal yang dapat menjamin kelangsungan pemerintahan kolonial Belanda di masa-masa mendatang, sebuah sistem pendidikan didirikan. Berdasarkan sebuah model hierarkis, keturunan-keturunan yang paling penting, yaitu para administrator pribumi dan keluarga-keluarga bangsawan, diberi kesempatan untuk belajar sejauh subyek-subyek yang dipelajari relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kekuasaan kolonial. Dalam *Memorie* Komandan Voorn, perkembangan-perkembangan tersebut ditunjukkan oleh Sekolah Berasrama Donggala: "*Het internaat van Donggala vormt nu de bibit, waaruit later de hoofden en Zelfbestuurders kunnen worden gekozen*"<sup>43</sup> (KIT 1198:18f). Pendidikan untuk masyarakat umum didorong hanya pada tingkat tentang pengelolaan tanah yang baik dan pembayaran pajak yang benar dilakukan.

Upaya pemerintah Belanda untuk mengamankan kontrol mereka terhadap penduduk

<sup>42</sup> Meskipun demikian, akar dari perluasan program transmigrasi di bawah Presiden Soeharto sudah ada sejak masa penjajahan Belanda (lihat juga Boomgard et al., 1991:55).

<sup>43</sup> "Sekolah Berasrama Donggala menabur benih yang nantinya dapat dipilih pemimpin-pemimpin dan pengelola-pengelola mandiri."

pribumi dengan pemerintahan tidak langsung menyebabkan pelestarian banyak aspek hukum yang ditentukan oleh adat. “*Aan de toestand is feitelijk niets veranderd, alleen heeft nu elk landschap een hoofdmadika, erkend door 't Gouvernment, terwijl 't ambt van tadulaka vervallen is*”<sup>44</sup> (Anonim, 1912:13).

Bala Keselamatan adalah lembaga terpenting yang membangun sekolah-sekolah di daerah-daerah penelitian. Pendidikan dan misionaris berjalan paralel ketika para misionaris mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja di desa-desa.

Di sisi lain, pemerintahan Belanda di Sulawesi Tengah sangat bergantung pada penguasa-penguasa Bugis, yang memegang kekuasaan politiknya disertai dengan penyebaran Islam<sup>46</sup> (Kruyt, 1938, vol. 3:10). Hal ini menjadi sebuah dilema bagi para pejabat kolonial antara perlindungan yang terus-menerus terhadap kekuasaan dan penguatan Kekristenan. Dalam konteks ini, Jäckel (1990: 113) menunjuk pada tujuan Belanda untuk merasionalisasi struktur-struktur kekuasaan tradisional, yang dicirikan dengan sebuah campuran fungsi-fungsi politik dan ritual atau agama. Belanda sangat ingin menguasai ken-

dali di bidang sekuler, sedangkan bagian keagamaan diserahkan ke tangan para misionaris, dalam hal ini Bala Keselamatan. Belanda pertama-tama meminta Albert C. Kruyt, seorang misionaris Belanda, untuk memimpin Kristenisasi di Sulawesi Tengah bagian barat seperti yang telah dilakukannya di wilayah Poso di bagian timur. Namun, Kruyt menolak, sehingga pemerintah kolonial meminta Bala Keselamatan untuk menjalankan misi tersebut (Aragon, 1996b:47). Bala Keselamatan ingin mengubah semua aspek animisme adat tradisional yang tidak sesuai dengan agama mereka sendiri dan membiarkan aspek-aspek lain tanpa perubahan seperti yang dinyatakan oleh petugas Bala Keselamatan Roselund pada tahun 1933:

Banyak petugas tampaknya mengang-gap bahwa kebiasaan lama orang-orang primitif – yang disebut kebiasaan kafir – semuanya adalah Si Jahat, dan karena itu harus dicabut. Menurut saya ini adalah sebuah kesalahan besar. Dalam kebiasaan kuno orang Toraja di pedalaman Sulawesi Tengah, misalnya, saya telah menemukan banyak hal yang baik, dan jika disesuaikan dengan benar, mereka akan menyediakan suatu struktur di mana seseorang dapat menyesuaikan semua praktik baru dalam kehidupan Kristen – **setelah Roh Tuhan mengubah hati orang-orang, tentu saja**<sup>47</sup> (op.cit., Aragon, 1992:168).

Pada tahun 1922, sebagian besar pusat misionaris Bala Keselamatan yang penting di Lembah Palu berada di Kalawara-naputih, Bora, Rowiga dan Sidondo, sedangkan pos-pos didirikan di Kulawi,<sup>48</sup> Gimpu, Kantewu,

<sup>44</sup> *Madika* atau *maradika* (di daerah Kulawi dan Koro) berasal dari kata *mahardika*, yang di Malaysia berarti "bebas dari perbudakan". Dalam bahasa Bugis kata *maradika* memiliki arti yang sama (Kruyt, 1938, Bd. 1:25).

<sup>45</sup> "Statusnya tidak berubah. Hanya saja, setiap *landschap* sekarang memiliki *madika* besar yang diangkat oleh gubernur. Pada saat yang sama, jabatan *tadulaka* dihapuskan." Urusan kampung kemudian hanya ditangani oleh *madika* (di dalam kampung) atau *totuwa* (di luar kampung). Menurut adat, *tadulaka* hanya dikonsultasikan jika terjadi perang.

<sup>46</sup> Dalam sumber-sumber primer, keberadaan masjid di *onderafdeeling* Palu sudah dicatat pada tahap awal pemerintahan kolonial (KTLVK 1911:113).

<sup>47</sup> Penekanan penulis.

<sup>48</sup> Hingga kini, masyarakat setempat menyebut kawasan Bolapapu, desa utama Kecamatan Kulawi

Winatu dan Lindu di wilayah pegunungan Kulawi. Pos-pos Bala Keselamatan juga ada sebagian di Pakawa (MMK 304:42). Empat tahun kemudian, para misionaris telah membangun 18 sekolah di Lembah Palu. Namun, tempat utama kegiatan mereka untuk dataran Palu tetap di Kalawara-naputih, pemukiman transmigrasi Jawa Kristen, dan Kantewu menjadi sebuah pusat misionaris di *district* Kulawi (MMK 305:167). Hanya 18 tahun kemudian, pada tahun 1931, Bala Keselamatan memiliki 50 perwira di 71 desa, menjaga 18 sekolah untuk 1.300 murid (*ibid.*: 172).

Di daerah-daerah pegunungan, dengan medan yang tidak dapat diakses telah mencegah penyebaran secara cepat Bugis Islam untuk mendapatkan sebuah pijakan sampai awal abad ke-20, misionaris Kristen semakin didorong oleh pemerintah kolonial (MMK 304:42). Namun, Grubauer (1913:147) menyebut Islam sebagai agama utama di dataran tinggi Danau Lindu. Sebelum mengambil alih kendali kolonial di wilayah studi kasus, Belanda telah mengirim misionaris-misionaris ke wilayah-wilayah pegunungan, terutama di selatan *onderafdeeling* Palu, dalam rangka mempersiapkan penjajahan terhadap penduduk setempat. Namun, para opsir Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah bagian barat tidak terlalu mengandalkan misi keagamaan murni. Sebaliknya, mereka peduli dengan persiapan-persiapan untuk memfasilitasi pembangunan kolonial yang efektif. Hal ini dicontohkan dalam pemberian oleh-oleh (terutama kepada anak-anak), yang kemudian berakhir di kotak koleksi misi, dan dengan demikian memper-

kenalkan orang-orang dengan moneterisme. Pada saat yang sama, misi tersebut menghancurkan pertukaran barang yang seimbang antara penduduk dataran tinggi dan penduduk dataran rendah. Ketergantungan-ketergantungan yang diciptakan oleh impor barang-barang eksotik Eropa dapat dianggap sebagai persiapan untuk kontrol negara kolonial (lihat Aragon, 1992; 1996b). Aragon (1996b:56) merangkum dampak-dampak dari kegiatan Bala Keselamatan sebagai berikut:

*Dalam situasi prakolonial Sulawesi Tengah, memberi dan menerima dianggap mengangkat status baik orang-orang dataran rendah maupun orang-orang dataran tinggi. Dalam situasi kolonial, ketidakmampuan penduduk dataran tinggi untuk melawan hadiah-hadiah Eropa mengkompromikan posisi mereka sebagai para peserta dalam sebuah hubungan pertukaran. Kedua, bukti Sulawesi Tengah menggerakkan konsep tentang pergeseran hierarki dalam pertukaran-pertukaran politik dari konteks regional yang sempit ke dalam konteks sebuah lintas budaya dan menunjukkan bagaimana pemberian hadiah yang dianggap "gratis" dapat membangun sebuah bentuk ketidakseimbangan kolonial yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berubah arah.<sup>49</sup>*

Dengan demikian, kristenisasi lebih dari sekadar sebuah perubahan keyakinan agama yang murni. Disengaja atau tidak, secara signifikan mendukung tujuan pemerintah kolonial untuk menciptakan keadaan ketergantungan. Dalam pengertian ini, kita akan menilai kebijakan etis, melalui cara memperluas sistem pendidikan atau dengan cara

---

dan sekitarnya, dengan sebutan Kulawi. Dalam beberapa, bahkan beberapa peta terbaru daerah ini, desa utama Bolapapu masih disebut Kulawi. Menurut penduduk setempat, sebuah desa bernama Kulawi tidak pernah ada di wilayah ini.

---

<sup>49</sup> Huruf miring seperti pada sumber aslinya.

memperkenalkan sebuah agama yang lebih baik. Salah satu dari hal ini akan memajukan kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi kolonial.

#### *Perubahan Kolonial pada Infrastruktur Transportasi*

Pembangunan-pembangunan infrastruktur kurang memperhatikan perbaikan-perbaikan rumah-rumah individu — kecuali bangunan-bangunan kolonial, terutama di ibu kota Palu, — tetapi lebih pada pembuatan sebuah jaringan jalan yang dampak-dampaknya didokumentasikan dalam *Memorie van overgave*. Menyediakan akses ke wilayah-wilayah pertanian utama, jalan-jalan tersebut dibangun atau diperbaiki untuk memastikan pengangkutan produk-produk yang lancar dan cepat. Oleh karena itu, pembangunan jalan difokuskan pada daerah barat Palu, di mana hamparan-hamparan sawah terbaik di *onderafdeeling* berada, bagian sisi timur Sungai Palu dengan proyek-proyek irigasi Gumbasa, Wunu, Pandeki dan sebagainya, serta wilayah-wilayah di selatan menuju dataran Gimpu yang subur. Transportasi juga semakin terhubung.

Pada tahun 1925, sudah ada sebuah jalur transportasi kuda yang menghubungkan Lembah Kulawi dengan dataran Palu, tetapi sebuah peningkatan jalur ini sebagai sebuah jalan transportasi mobil terhambat karena tidak adanya desa-desa terdekat yang dapat memasok para pekerja paksa yang dibutuhkan. (KIT 1198:2). Namun, pemerintah kolonial mendorong perbaikannya karena wilayah Kulawi secara ekonomi sangat terisolasi tetapi penting karena banyaknya sawah dan hasil-hasil hutan (ibid.).

Kebijakan etis terlihat dalam pengamatan Kruyt mengenai masalah-masalah moral para perwira dengan perluasan infrastruktur:

*"En het onaangenaamste voor de bestuursambtenaren is, dat zij bij de bevolking den indruk wekken, dat de menschen maar steeds de wegen moeten herstellen te gerieve van de heeren, opdat zij er met hun auto's langs kunnen snorren"*<sup>50</sup> (1929:527).

Berbeda dengan daerah Poso, di mana pemerintah kolonial telah sia-sia berusaha untuk memperkenalkan pasar (Kruyt, 1926: 539), Kruyt dan Adriani menyaksikan kehidupan pasar yang sibuk sejak tahun 1897: *"Lang voordat het Gouvernement di Palu kwam, memiliki laki-laki di de streek tal van passars"*<sup>51</sup> (ibid.). Di bawah pemerintah Belanda, perdagangan terfokus terutama pada produk-produk pertanian dan didominasi oleh orang-orang Eropa, Cina dan Arab (MMK 304:70; MMK 305:137).

Perpaduan antara pemikiran kebijakan etis dan perhitungan ekonomi yang ketat serta sikap-sikap berbeda terhadap penduduk dataran rendah dan dataran tinggi diejawantahkan dalam rencana-rencana Belanda untuk membangun jalan-jalan ke pegunungan

<sup>50</sup> "Dan bagi para administrator, hal yang paling tidak menyenangkan adalah bahwa mereka menimbulkan kesan di antara orang-orang bahwa mereka tetap harus membangun jalan untuk melayani para atasan sehingga atasan mereka dapat mengemudikan mobil." Menurut *Encyclopaedie* (1921, Vol. 4:745), penduduk terjajah tidak diperbolehkan menggunakan jalan karena akan mengganggu lalu lintas. Meskipun peraturan ini dicabut setelah kebijakan etis diperkenalkan, sehingga Cribb (1993:239) mencatat bahwa pemerintah Belanda tetap melarang kendaraan-kendaraan khusus tradisional. Peraturan semacam itu tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber yang dicari di wilayah penelitian ini.

<sup>51</sup> "Jauh sebelum pemerintah di Palu didirikan, banyak pasar yang sudah ada di daerah ini."

Pekawa di sebelah timur Lembah Palu. Belanda sudah merencanakan sebuah jalan mulai dari jalan Palu-Bobo 600 meter ke barat karena akan ada tempat-tempat yang sangat baik untuk budidaya buah dan kacang-kacangan pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Setelah itu, jalan akan dilanjutkan hingga Matantimali yang berada di ketinggian 1.200 meter. Perpaduan ini paling baik tercermin dalam dua kutipan berikut:

*Het z.g. Pekawa bergland is door deze weg uit zijn isolement verlost. Ik will niet berwerden dat de bergbevolking zelf hierop erg gesteld zal zijn, maar uit bestuurs-oogpunt is de weg van veel belang en de vlaktebevolking zal hier graag groenten, koffie en andere bergcultures beginnen*<sup>52</sup> (KIT 1203:8).

Sebagian dari jalur tersebut harus dibangun oleh penduduk pegunungan setempat karena:

*"hierdoor de niets-bezittende bergbevolking in de gelegenheid wird gesteld haar achterstallige belastingen (vaak 3 en meer jaren was niets betaald) di arbeid te voldoen op niet to groote afstand van hun woonplaats in een voor hen passend klimaat*<sup>53</sup> (ibid.).

<sup>52</sup> "Yang disebut dengan dataran tinggi Pekawa dengan cara ini akan dibawa keluar dari keterasingannya. Saya tidak ingin berargumen bahwa penduduk pegunungan sangat senang dengan itu, tetapi dari sudut pandang administrasi, jalan itu sangat penting, dan penduduk dataran itu akan dengan bersemangat memulai budidaya kacang-kacangan, kopi, dan produk dataran tinggi lainnya."

<sup>53</sup> "Untuk memberikan kesempatan kepada penduduk pegunungan yang tidak memiliki apa-apa untuk membayar pajak terutang mereka (tidak ada yang telah membayar selama hampir tiga tahun atau lebih)

Dapat diasumsikan bahwa infrastruktur transportasi diperlukan untuk kepentingan-kepentingan ekonomi pemerintah kolonial untuk transportasi produk-produk ekspor. Dalam hal transportasi, kebijakan etis terutama didasarkan pada motif-motif ekonomi tersembunyi.

Dalam *Memorie* tahun 1935 disebutkan bahwa ada sebuah jalur kuda antara Bora (Sigi-Biromaru) dan *vruchtbaare*<sup>54</sup> Lembah Palolo tempat orang-orang Tionghoa menanam kopi dan kacang-kacangan (KIT 1203:8). Banyak penduduk setempat telah membangun kebun di dalam dan sekitar desa utama (ibid.). Belanda mengakui potensi ekonomi yang besar dari lembah itu untuk perluasan produksi sawah. Daerah perbatasan dengan Parigi cocok untuk eksploitasi rotan dan karet (hasilnya dibawa dengan menunggang kuda), tetapi pada tahun 1932, kerja paksa digunakan untuk memperbaiki jalan untuk angkutan mobil (ibid.). Lembah Palu itu sendiri, wilayah Kulawi, Lembah Palolo dan pegunungan barat Pekawa dengan demikian dilihat sebagai wilayah-wilayah ekonomi yang paling penting untuk pembangunan cepat jalur transportasi.

#### *Kerja Paksa di bawah Kebijakan Etis*

Kekuasaan kolonial tidak akan memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi di wilayah penelitian dengan derajat yang sama tanpa penggunaan kerja paksa di tingkat lokal (*kampungdiensten*) dan regional (*heerendiensten*) dan pengenalan pajak pendapatan, pajak pasar dan pajak kepala. Sistem perpajakan yang juga berfungsi untuk menertibkan penduduk pribumi pada awalnya disesuaikan dengan tingkat literasi yang rendah di daerah

dengan tenaga kerja yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka dan dalam iklim yang sesuai. "

<sup>54</sup> "subur"

agar dapat memungut pajak secepat mungkin (MMK 304:131).

Sistem infrastruktur dikerjakan hampir secara eksklusif dengan mempekerjakan para pekerja paksa. Layanan-layanan kerja tersebut bisa dipaksakan hingga satu bulan per tahun. *Heerendiensten* digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, *kampongdiendiensten* untuk pemeliharaan jalan-jalan dan alun-alun desa. Pengenalan layanan-layanan kerja tersebut dibenarkan dengan pernyataan yang dipertentangkan bahwa penduduk setempat telah melakukan kerja layanan seperti itu untuk raja-raja mereka sebelum awal penjajahan dan oleh karenanya terbiasa dengan itu.<sup>55</sup>

## Kesimpulan

Di wilayah Sulawesi Tengah yang diteliti di sini, kekuasaan kolonial Belanda secara luas mempengaruhi masyarakat tradisional dan struktur-struktur ekonomi. Dimensi-dimensi intervensi kolonial ini sangat mencolok mengingat fase tindakan-tindakan pemerintahan langsung yang relatif singkat (1905-1942).

---

<sup>55</sup> Jepang juga menggunakan kerja paksa selama kekuasaan singkat mereka di kepulauan itu untuk mengeksploitasi tambang Mika di selatan daerah penelitian mulai tahun 1942 dan seterusnya. Selain pertambangan, yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda tidak terlalu penting – hanya dilakukan penyelidikan-penyelidikan geologi secara individual – Jepang juga melakukan intervensi di bidang pertanian dengan menghentikan rotasi tanaman yang diperkenalkan oleh Belanda. Oleh karena itu, penggunaan lahan di wilayah ini berubah tiga kali dalam beberapa dekade. Selain itu, Jepang memaksakan penanaman kapas untuk industri tekstil mereka. “Lereng-lereng Lembah Kulawi benar-benar ditebangi dari pohon untuk produksi kapas Jepang sehingga terjadi erosi yang parah, dan larangan berladang berpindah paskakolonial tetap berlaku hingga saat ini” (Aragón, 1996a:60).

Sementara para orientalis Leiden, kalangan akademisi dari Leiden di Belanda yang mengedepankan nilai-nilai etika dalam kebijakan kolonial, tentu bermaksud baik, namun implementasi kebijakan etis tersebut tidak berhasil. Ini karena eksekutif lokal yang ditugaskan untuk mengelola koloni. Penulis *Memorie van overgave* sering menggambarkan – secara tersirat – intervensi-intervensi terhadap lanskap budaya yang dilakukan di bawah kekuasaan mereka sebagai motivasi etis. Akan tetapi, fakta-fakta yang tampak dalam uraian mereka menunjukkan cara lain, yaitu eksploitasi yang efektif atas barang-barang ekspor dan menjaga kelangsungan keberadaan koloni melalui administrasi yang tepat. Oleh karena itu, kebijakan etis yang diuraikan di atas harus dilihat sebagian besar sebagai kamufase untuk “citra non-imperialistik” (Kuitenbrouwer 1991: 18) yang dimaksudkan Belanda untuk disajikan kepada lawan-lawan Eropa mereka sebagai contoh kekuasaan kolonial yang kuat secara moral.

Di bidang studi, kebijakan etis harus dianggap sebagai sebuah kegagalan yang terkait dengan tujuan-tujuan awalnya. *Volksverheffing* umum tidak terjadi sama sekali. Tidak ada pembangunan sekolah-sekolah untuk seluruh masyarakat. Bahkan kemungkinan bagi para keturunan elit lokal untuk bersekolah pun terbatas, karena penguasa kolonial bermaksud untuk memperluas kekuasaan mereka sambil memberi imbalan sesedikit mungkin.

Perubahan-perubahan dalam produksi pertanian diatur oleh perdagangan dunia yang telah mempengaruhi Sulawesi Tengah sejak penaklukan Belanda. Sarana transportasi baru berkaitan erat dengan kebutuhan ekonomi, seperti jalan untuk mengangkut hasil bumi dari areal budidaya. Namun, kebutuhan akan produksi subsisten yang cukup diakui oleh para administrator Belanda. Dengan demikian,

eksploitasi agraria di daerah ini dibatasi oleh kekhawatiran tentang penghidupan dasar masyarakat. Tidak ada sistem perkebunan skala besar atau penanaman paksa (*cultuurstelsel*) yang diperkenalkan, dan dengan demikian, berbeda dengan Jawa atau bahkan Sumatera dan Kalimantan, ekonomi pertanian tidak banyak berubah di bawah pemerintahan Belanda.

Mengenai masalah migrasi, Belanda memulai pemukiman kembali orang-orang lokal dan antar pulau yang berlanjut setelah Indonesia diberi kemerdekaan oleh pemerintah pasca-kolonial. Kekuatan pendorong saat itu – dan sampai saat ini – adalah pemerintahan rakyat yang lebih mudah. Pemungutan pajak atau penyediaan tenaga kerja paksa untuk jalan atau sistem irigasi harus difasilitasi. Lembah-lembah harus dibudidayakan lebih intensif dengan padi basah dan pohon kelapa. Bahwa para administrator kolonial tidak memukimkan kembali orang-orang dari pegunungan ke dataran dalam skala besar mungkin disebabkan oleh kebijakan etis pada waktu itu, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa penulis. Oleh karena itu, para penguasa kolonial tidak bertindak sebagai sebuah kekuatan penstabilan di wilayah studi tetapi membingungkan penduduk lokal melalui berbagai pengaruh baru. Hanya sistem kolonial mereka sendiri yang distabilkan.<sup>56</sup>

Namun, sejauh sumber memperlihatkan, tidak pernah ada upaya Belanda untuk mengubah lanskap budaya wilayah penyelidikan sepenuhnya dan tanpa menghormati penduduk setempat. Mungkin ada tiga alasan untuk ini. Pertama, orang mungkin berasumsi bahwa

dampak-dampak terhadap kawasan tersebut akan jauh lebih buruk, dilihat dari perspektif penduduk setempat, tanpa kebijakan kolonial baru tersebut yang menyertai awal abad ke-20 tersebut. Kedua, Belanda membutuhkan kemurahan hati para pemimpin lokal untuk mengatur bagian wilayah jajahan tersebut semudah mungkin. Ketiga, misionaris, dalam hal ini Bala Keselamatan, memainkan sebuah peran utama dengan mempersiapkan kondisi di lapangan di daerah tersebut untuk pemerintahan Belanda, tidak terkecuali memfasilitasi pemukiman-pemukiman kembali dari wilayah-wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.

Hasil-hasil yang disajikan di sini sebagian besar didasarkan pada *memorie van overgave*. Meskipun banyak pandangan tentang perkembangan Sulawesi Tengah di bawah kekuasaan Belanda dapat diperoleh dengan sebuah analisis rinci tentang sumber-sumber tersebut yang harus diperlakukan dengan hati-hati. *Memorie* tersebut disensor oleh kementerian kolonial dan otoritas-otoritas lain di Belanda, dan tergantung pada penulis masing-masing untuk memutuskan aspek-aspek mana yang akan dimasukkan dalam dokumen-dokumen. Tampaknya sangat mungkin bahwa banyak dampak dari kehadiran kolonial di Sulawesi Tengah tidak dimasukkan dengan sengaja. Berdasarkan analisis ini, informasi dari sejarah lisan, seperti yang digunakan oleh Aragon (1996a) untuk penelitiannya tentang Pendudukan Jepang di wilayah Tobaku Sulawesi Tengah, akan menjadi sebuah langkah selanjutnya untuk mendapatkan sebuah gambaran yang lebih kompleks tentang pembangunan kolonial terhadap lanskap budaya daerah ini. Hal ini juga akan membantu memperjelas factor-faktor dan proses-proses yang mempengaruhi pembangunan pascakolonial di Sulawesi bagian Barat dan menentukan pola-pola penggunaan lahan saat ini, terutama yang

<sup>56</sup> Memang, destabilisasi kekuatan kolonial terjadi pada akhir pemerintahan Belanda dan selama Pendudukan Jepang ketika kalangan nasionalis anti-kolonial - terutama di pusat kekuasaan, Jawa - mengartikulasikan tuntutan mereka untuk kemerdekaan.

berkaitan dengan (de-)stabilisasi batas hutan hujan di sekitar Taman Nasional Lore Lindu.

## Daftar Pustaka

**Sumber yang tidak diterbitkan dari Arsip Nasional, mantan *Algemeen Rijksarchief* (Den Haag).**

MMK 303 (1910) Hengel, J. van (resident):  
MvO van de residentie Manado.

MMK 304 (1922) Logeman, F.H.W.J.R.  
(resident): MvO van de residentie Manado.

MMK 305 (1926) Tideman, J. (resident):  
MvO van de residentie Manado.

MMK 308 (1941) Rhijn, M. van (resident):  
MvO van de residentie Manado.

[KIT1198 \(1925\)](#) Voorn, M.C. (gezaghebber):  
Aanvullende memorie inzake de onderafdeeling Paloe.

[KIT1202 \(1934\)](#) Hirschmann, F. Ch. H. (mil. gezaghebber): Vervolg-memorie (op. M. Junius) inzake de afdeeling Donggala.

[KIT1203 \(1935\)](#) Vorstman, J.A. (controleur):  
Aanvullende MvO van de onderafdeeling Paloe.

[KIT1206 \(1937\)](#) Ansingh, W. (gezaghebber):  
Nota inzake het landschap Sigi-Dolo.

## Sumber Tercetak

Acciaioli, Greg (1987) “Networks and Nets: Principles and Processes in Bugis Migration Strategies to Lake Lindu, Central Sulawesi.” (Published in *International Workshop on Indonesian Studies*, no. 2.)

Adriani, N. (1915) “Maatschappelijke, speciaal economische verandering der bevolking

van Midden-Celebes, sedert de invoering van het nederlandsch gezag aldaar.” In *Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap*, tweede serie deel, XXXII:457–75.

Adriani, N. and Alb. C. Kruijt (1912–1914) [De bare'e-sprekende Toraja's van midden-Celebes](#). Batavia. 3 vols. No publisher.

Altona, Hans (1890) *Geschichtliche Entwicklung Niederländisch-Indiens*. Braunschweig: Krampe Verlag.

Anonymus (1912) “[Nota van toelichting over de Berglandschappen boven het Paloedal](#),” *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, pp. 1-26.

Aragon, L.V. (1992) *Divine Justice: Cosmology, Ritual and Protestant Mission in Central Sulawesi, Indonesia*. Ph.D. thesis. University of Illinois. Urbana: UMI.

(1996a) “[Japanese Time and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands](#),” *Journal of Southeast Asian Studies* 27(1):49–63.

(1996b) “Twisting the Gift: Translating Precolonial into Colonial Exchanges in Central Sulawesi, Indonesia,” *American Ethnologist* 23(1):43–60.

*Atlas van tropisch Nederland* (1938).

Balibar, E. and I. Wallerstein (1992) *Rasse, Klasse, Nation. Ambivalente Identitäten*. Hamburg: Argument Verlag.

Barlow, Colin (1989) “A Comparison of Factors Influencing Agricultural Development in Malaya and Indonesia, 1870–1940.” In A. Maddison and G. Prince (eds.), *Economic Growth in Indonesia 1820–1940*. Leiden and Dordrecht: Foris Publications. pp. 227–58.

Blok, D.P. et al. (eds.) (1978) *Algemene Geschiedenis der Nederlande*. Vol. 14. Haarlem: Fibula - Van Dishoek.

Boomgard, Peter et al. (1991) *Population*

- Trends 1795–1942.* (Published in *Changing Economy in Indonesia*, vol. 11.) The Hague: Nijhoff.
- Boomgard, Peter (1993) "Upliftment Down the Drain? Effects of Welfare Measures in Late Colonial Indonesia." In Jan-Paul Dirkse (ed.), *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences Under the New Order*. Leiden: KITLV Press. pp. 247–53.
- Caldwell, Malcolm and Ernst Utrecht (1979) *Indonesia: An Alternative History*. Sydney: Alternative Publ. Co-op.
- Coté, Joost (1979) "[The Colonization and Schooling of the To Pama of Central Sulawesi, 1894 to 1924.](#)" M.A. thesis. Clayton, Victoria, Monash University, Melbourne.
- (1996) "[Colonising Central Sulawesi. The 'Ethical Policy' and Imperialist Expansion 1890–1910.](#)" *Itinerario*, 20(3):87–107.
- Cribb, Robert (1993) "Development Policy in the Early 20th Century." In J.-P. Dirkse, *Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under the New Order*. Leiden: KITLV Press. pp. 225–45.
- (1994) "Introduction. The Late Colonial State in Indonesia." In Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880–1942*. Leiden: KITLV Press. pp. 1–9.
- Dahm, Bernhard (1974) *Emanzipationsversuche von kolonialer Herrschaft in Süd-ostasien. Die Philippinen und Indonesien. Ein Vergleich.* (Published in Schriftenreihe des Instituts für Asienkunde, vol. 37.) Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.
- (1990) "Der Dekolonisationsprozeß Indonesiens. Endogene und exogene Faktoren." In Wolfgang J. Mommsen (ed.), *Das Ende der Kolonialreiche. Dekolonisierung und die Politik der Großmächte*. Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag. pp. 67–88.
- Doel, H.W. van den (1994) "Military Rule in the Netherlands Indies." In Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880–1942*. Leiden: KITLV Press. pp. 57–78.
- Encyclopaedie (1921) *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. 4 vols. Den Haag, Leiden: Nijhoff.
- Emmer, P. et al. (eds.) (1988) *Dokumente zur Geschichte der europäischen Expansion*. 7 vols. München: Beck Verlag. Fasseur, C.
- (1994) "Cornerstone and Stumbling Block: Racial Classification and the Late Colonial State in Indonesia." In Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880–1942*. Leiden: KITLV Press. pp. 31–56.
- Fieldhouse, D.K. (ed.) (1965) *Die Kolonialreiche seit dem 18. Jahrhundert.* (Published in Fischer Weltgeschichte, vol. 29.) Frankfurt am Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag.
- Frank, Georg (1911) *Niederländisch-Indien. Eine Finanzquelle für das Mutterland.* Ph.D. thesis. Würzburg: University of Würzburg.
- Gretzer, W.K.G. (1939) *Grundlagen und Entwicklungsrichtung der landwirtschaftlichen Erzeugung in Niederländisch-Indien.* (Published in Berichte über Landwirtschaft, vol. 146. Sonderheft.) Berlin: Parey Verlag.
- Grubauer, A. (1913) *Unter Kopffägern in Central-Celebes. Ethnologische Streifzüge in Südost- und Central-Celebes.* Leipzig: Voigtländer Verlag.

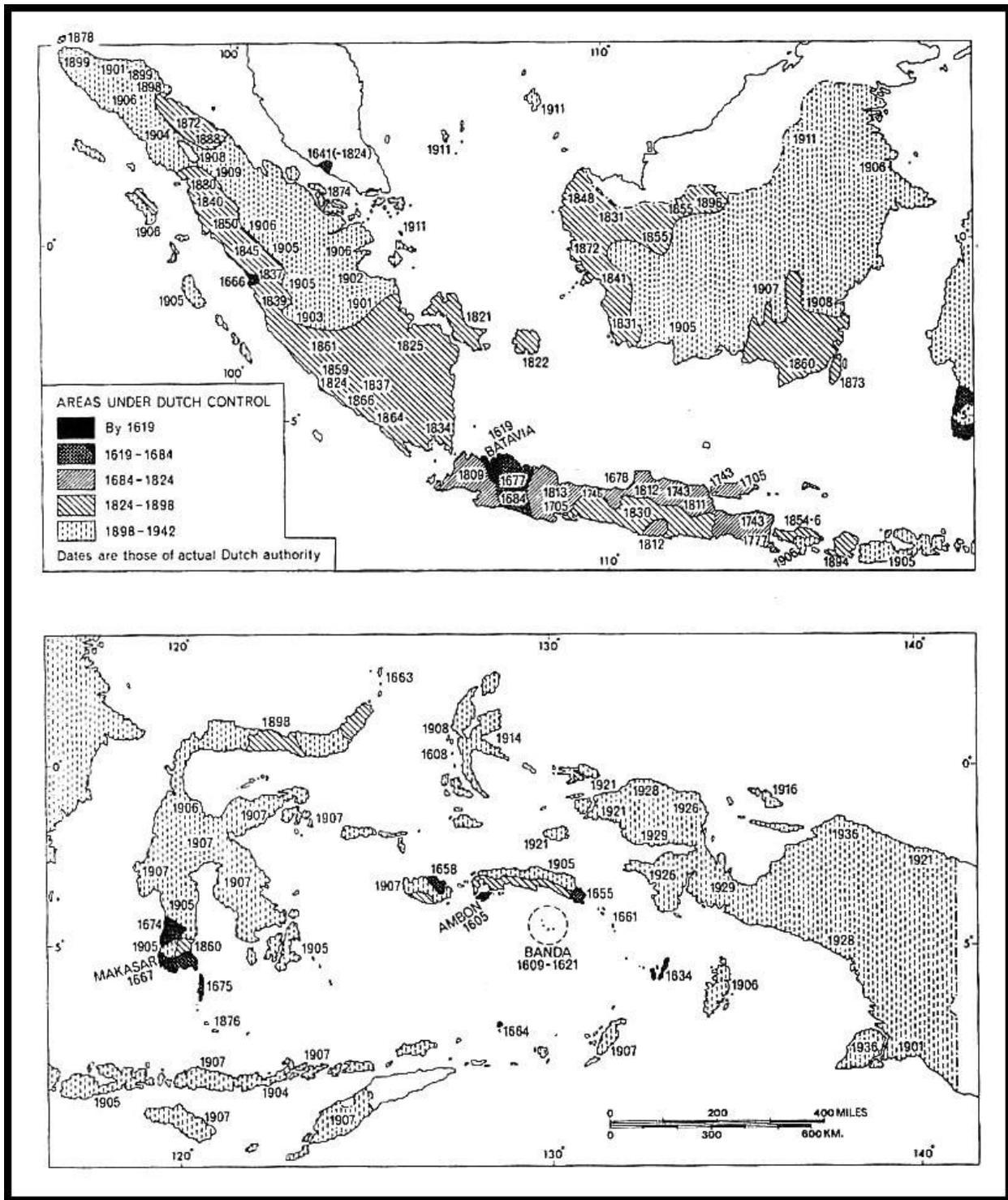
- Hart, J.C. (1853) *Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche Eilanden*. s'Gravenhage: K. Fuhri.
- Henley, David E.F. (1989) “*The Idea of Celebes in History*.” Working Paper No. 59. Centre of Southeast Asian Studies, Clayton, Victoria.
- (1996a) “Carrying Capacity, Climatic Variation and the Problem of Low Population Growth in Precolonial Indonesia. Evidence from North Sulawesi.” Paper for the EDEN/KITLV Workshop, “*Man and Environment in Indonesia*”, Leiden. 27–29 June 1996.
- (1996b) *Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahassa in the Dutch East Indies*. (Published in *Verhandelingen voor het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*, vol. 168.) Leiden: KITLV Press.
- (1997) “Goudkoorts: mijnbouw, gezondheid en milieu op Sulawesi (1670–1995),” *Spiegel Historiael*, 32(10–11):424–30.
- Hissink (1909) “[Nota van toelichting, betreffende de zelfbesturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroë](#).” In *Tydschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* (1912). KITLV Press. pp. 58–129.
- Jäckel, W. (1990) *Tauschhandel und Gesellschaftsform. Entwicklung des Markthandels bei den Toraja (Indonesien)*. (Published in *Urbs et Regio*, vol. 55.) Kassel: University Press.
- Kahn, Joel S. (1981) “Mercantilism and the Emergence of Servile Labour in Colonial Indonesia.” In J.S. Kahn and J.R. Lobera (eds.), *The Anthropology of Pre-capitalist Societies*. London: Macmillan Press.
- Kaudern, Walter (1925) [Structures and Settlements in Central Celebes. Results of the Author's Expedition to Celebes 1917–1920](#). (Published in *Ethnographical Studies in Celebes*, vol. 1.) Göteborg: Elander Verlag.
- Kielstra, J.C. (1922) *Die niederländischen Kolonien in Süd-Ostasien im Weltverkehr*. (Published in *Kieler Vorträge Nr. 7.*) Kiel, Jena: Fischer Verlag.
- Kipp, Rita Smith (1990) *The Early Years of a Dutch Colonial Mission. The Karo Field*. Michigan: University of Michigan Press.
- Kolff, G.H. van der (1929) “European Influence on Native Agriculture.” In B. Schrieke (ed.), *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*. Bataviaia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. pp. 101–203.
- Kotilainen, E.-M. (1992) “[When the Bones are Left: A Study of Material Culture of Central Sulawesi](#),” *Transactions of the Finnish Anthropological Society* 31.
- Kötter, Herbert et al. (eds.) (1979) *Indonesien. Geographie, Geschichte, Religion, Staat, Gesellschaft, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft*. Tübingen (Published in *Buchreihe Ländermonographien*, vol. 11). Basel: Erdmann Verlag.
- Kruyt, A.C. (1903) “Gegevens voor het bevolkingsvraagstuk van een gedeelte van Midden-Celebes,” *Tjdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* XX(S):190–205.
- (1926) “[Pakawa, een landstreek in de onderafdeeling Paloe](#),” *Tijdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 43(4):526–44.
- (1929) “The Influence of Western Civilisation on the Inhabitants of Poso (Central Celebes).” In B. Schrieke (ed.), *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genoot-

- schap van Kunsten en Wetenschappen.
- (1935) "De Bewoners van Midden-Celebes, en de culturen, die invloed op hen hebben uitgeoefend," *Indische Gids*, July 1935.
- (1938) *De West-Toradjas op Midden-Gelebes*. 4 vols. (Published in Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel XL.) Amsterdam.
- KTLVK (Koninklijk Instituut Voor De Taal-, Land En Volkenkunde Van Nederlandsch Indie) (1911) "Regeringsrapport over de onderafdeeling Paloe (1910)," *Adatrechtsbundel* 1(0):130–44.
- Kuitenbrouwer, Maarten (1991) *The Netherlands and the Rise of Modern Imperialism: Colonies and Foreign Policy, 1870–1902*. New York: Berg.
- Leemann, A. (1976) *Bali. Auswirkungen des balinesischen Weltbildes auf verschiedene Aspekte der Kulturlandschaft und auf die Wertung des Jahresablaufes*. Bern: H. Lang.
- (1989) "Internal and External Factors of Socio-cultural and Socio-economic Dynamics in Lombok (Nusa Tenggara Barat)," *Anthropogeographie*, 8.
- Leirissa, R.Z. (1996) "Coprocontracten': An Indication of Economic Development in Minahasa." In Thomas Lindblad (ed.), *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1880s–1990s*. Amsterdam. pp. 265–77.
- Lindblad, J.Th. (1995) "Colonial Rule and Economic Development: A Review of the Recent Historiography on Indonesia," *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* 1:9–22.
- Locher-Scholten, Elsbeth (1981) *Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877–1942*. Zeist, Utrecht: HES Publications.
- Loze, Theophile H.M. (1929) *De indische zelfbesturende landschappen in het nieuwe staats-bestel*. Ph.D. thesis. University of Leiden. S'Gravenhage: J.C. van Lange.
- Maddison, A. and G. Prince (eds.) (1989) *Economic Growth in Indonesia 1820–1940*. (Published in Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 137.) Leiden, Dordrecht: Foris Publications.
- Masyhuda, M. et al. (1977) *Monografi Daerah Sulawesi Tengah*. 4 vols. Jakarta.
- Metzner, Joachim (1981) "Palu (Sulawesi): Problematik der Landnutzung in einem klimatischen Trockental am Äquator," *Erdkunde* 35:42–54.
- Pamei, Jore (1997) "Perang Bulu Momi: Perlawanan Towaolangi Raja Kulawi Terhadap Belanda." Paper presented at a seminar on the War at Mount Momi Kulawi. Palu. 8 November 1997.
- Poeze, H.A. and P. Schoorl (eds.) (1991) *Excursies in Celebes: een bundel bij het afscheid van dr. J. Noorduyt als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde*. (Published in Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. 147.) Leiden: KITLV Press.
- Prince, Gé H.A. (1995) "Dutch Policy in Colonial Indonesia 1900–1942," *Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte* 1:23–44.
- (1996) "Monetary Policy in Colonial Indonesia and the Position of the Java Bank." In Thomas Lindblad (ed.), *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1880s–1990s*. (Published in Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volken-

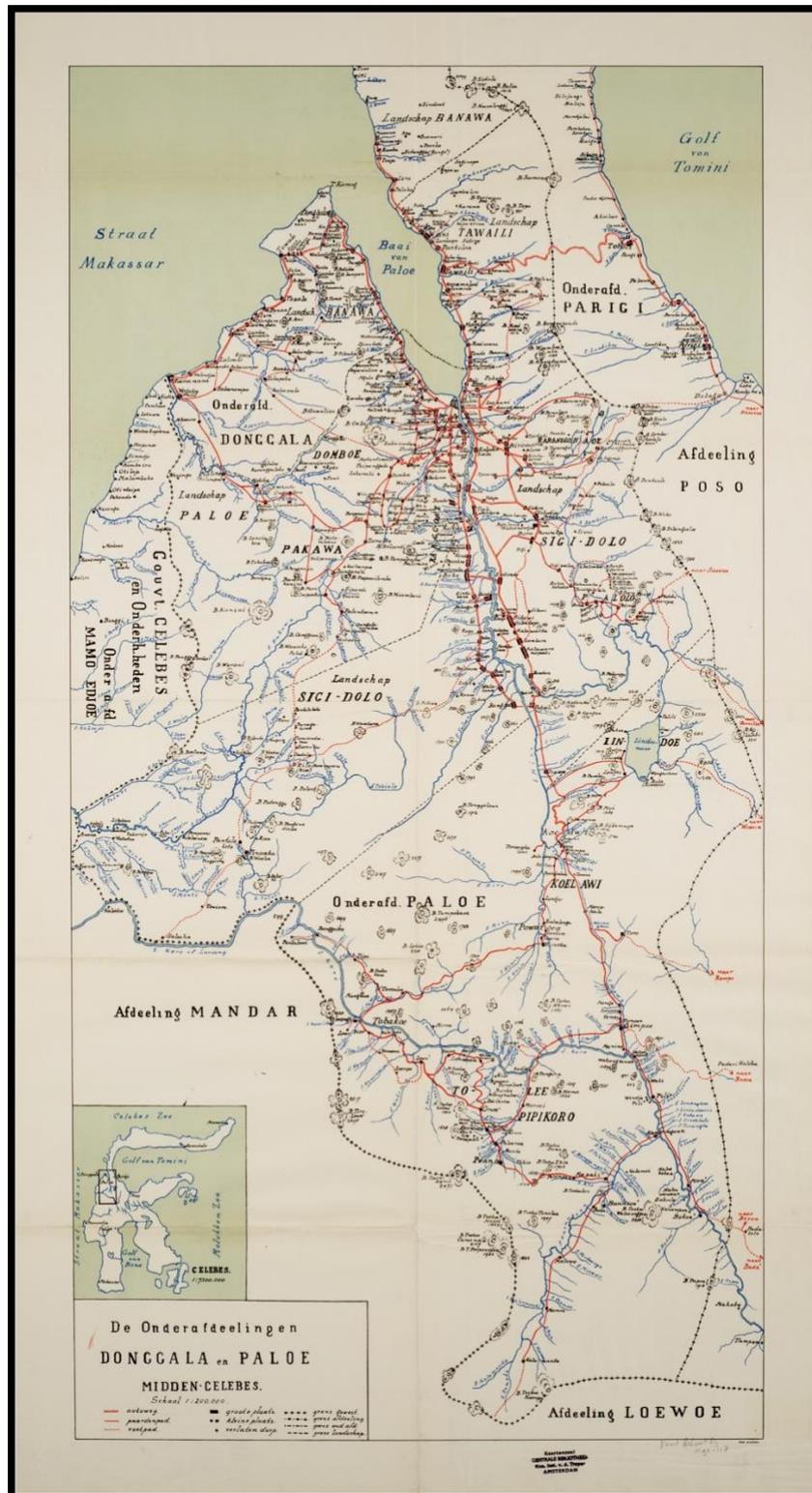
- kunde, vol. 167.) Amsterdam: N.V. Nord-Holland Publications. pp. 55–70.
- Reid, A. (1997) "Inside Out – The Colonial Displacement of Sumatra's Population," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 20(2):151-67.
- Ricklefs, M.C. (1981) *A History of Modern Indonesia: c. 1300 to the Present*. London: Macmillan Publications.
- Rössler, Martin (1997) *Der Lohn der Mühe: Kulturelle Dimensionen von Wert' und Arbeit im Kontext ökonomischer Transformation in Süd-Sulawesi, Indonesien*. Münster: Lit Verlag.
- Schrauwens, Albert (1999) "[It's Not Economical': The Market Roots of a Moral Economy in Highland Sulawesi](#)." In T.M. Li (ed.), *Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production*. Amsterdam: Harwood Academic Publications. pp. 105–29.
- Sieber, E. (1949) *Kolonialgeschichte der Neuzeit. Die Epochen der europäischen Ausbreitung über die Erde*. Bern: Francke Verlag.
- Spit, Henricus J. (1911) *De indische zelfbesturende landschappen. Hun mate van zelfstandigheid*. Ph.D. thesis. University of Leiden. S'Gravenhage: Het Vaderland.
- Suryo, Djoko (1987) *Social and Economic Life in Rural Semarang under Colonial Rule in the Later 19th Century*. Ph.D. thesis. Monash University. Clayton: Monash University.
- Tarnutzer (1995) "Kota Denpasar: The Making of a Balinese Colonial Town." In B. Werlen, and S. Wälty (eds.), *Kulturen und Raum – empirische Kulturforschung in Indonesien*. Zürich: Rüdiger Verlag. pp. 247–66.
- Thee Kian Wie (1989) "The Development of Sumatra, 1820–1940." In A. Maddison, and G. Prince (eds.), *Economic Growth in Indonesia 1820–1940*. Leiden, Dordrecht: Foris Publications. pp. 133–58.
- Tonelli, Lisa (1992) "*Case Study of Changing Land Use in the Middle Hills of Lombok, Central Sulawesi*." M.A. thesis. Dalhousie University, Halifax.
- Valentyn [Valentijn], Francois (1724–1726) *Oud en Nieuwe Oost-Indiën, Vervattende een Naaukerige en uitvoerige Verhandeling van Nederlands Mogentheyd in die Gewesten, benevens eene wydlustige Beschryvinge der Moluccos, Ambonia, Banda, Timor, en Solor, Fava, en alle de Eylanden onder de zelve Landbestieringen behoorende; het Comptoir op Suratte, en de Levens der Grootte Mogols*. 5 vols. Dordrecht, Amsterdam: Joannes van Braam, Gerard Theoretische Ansätze und onder de Linden.
- Van Niel, Robert (1991) "A Perception of a Perception of a Perception: Multatuli's View of Java in the 1850s," *Canadian Journal of Netherlandic Studies* 12:21-29.
- Vroklage, B.A.G. (1936) *Borneo, Celebes und Molukken*. Münster/ Westfalen. (Published in Die sozialen Verhältnisse Indonesiens. Eine kulturgeschichtliche Untersuchung, vol. 1.) Aschendorffsche Verlagsbuch-handlung.
- Weber, Robert (2000) *Die Kolonialzeit im heutigen Indonesien und ihre Auswirkungen auf Bevölkerung und Kulturlandschaft in Zentral-Sulawesi*. Göttingen. Unpublished diploma thesis. University of Göttingen.
- Wedema, Steven (1998) "*Ethiek" und Macht: die niederländisch-indische Kolonialverwaltung und Indonesiens Emanzipationsbestrebungen 1901–1927*. Stuttgart: Steiner Verlag.
- Wichmann, A. (1890) "Bericht über eine im

Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geogr. Ges. ausgeführten Reise nach dem Indischen Archipel," *Tjdschrift Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap* 7:907–94.

Gambar 1: Kronologi Penaklukan Belanda atas Kepulauan Indonesia (Missen, 1972: 131f, dalam Dunn, 1984:161)



Gambar 2: Perbatasan Kolonial Belanda di Sulawesi Tengah Bagian Barat pada tahun 1938



		Tanggal	Seluruh Nusantara	Sulawesi Tengah
<b>Masa pra-kolonial</b>		abad ke-5 abad ke-13	> Pengaruh Hindu-Budha pertama	> Kerajaan Makassar dan Bugis di Sulawesi Selatan
		abad ke-14	> Kerajaan Majapahit (Jawa)	
		abad ke-15	> Kesultanan Islam di Sumatera Utara > penyebaran Islam dari Jawa Barat ke Jawa Timur	
		1511	> Portugis menaklukkan Malaka	
<b>Pemerintahan kolonial Belanda</b>	<b>VOC</b>	1602	> pendirian Perusahaan Hindia Timur Belanda 1602 (Vereinigde Oostindische Compagnie — VOC) > awal pemerintahan kolonial Belanda	
		1605	> VOC menaklukkan benteng Ambon (Kepulauan Maluku)	> Kerajaan Gowa menjadi Muslim > wilayah kekuasaan diperluas ke Palu (Sulawesi Tengah)
		1641	> Belanda menaklukkan Malaka	
		1648		> Sulawesi Tengah berada di bawah kekuasaan VOC, tetapi tetap sebagai bawahan di bawah kesultanan Ternate (Maluku)
		1668	> Belanda menaklukkan Makassar	> Orang Bugis mengungsi dari Makassar ke Sulawesi Tengah
		abad ke-17	> kelanjutan kekuasaan di Jawa > kontrol perdagangan laut antara Ceylon dan Formosa > fase puncak VOC	> Palu menjadi pelabuhan perdagangan laut yang penting, bagian dalam pulau tetap tak tersentuh
		1710		> Sulawesi Tengah berada di bawah kekuasaan Pemerintah Makassar (Sulawesi Selatan)
	<b>Konsolidasi</b>	1800	> penutupan VOC 1800 > pengambilalihan harta jajahan oleh negara Belanda	
		Sejak 1830	> <i>cultuurstelsel</i> > kelanjutan perkebunan di Jawa	
	<b>Fase liberal</b>	Sejak 1870	> hukum agraria dalam rangka mendorong perekonomian swasta > fase ekonomi liberal > perpanjangan kekuasaan langsung Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi	
		1891		> Kristenisasi wilayah Poso
		Akhir abad ke-19		> orang Eropa pertama meninjau daerah selatan Palu
	<b>Kebijakan Etis</b>	1899	> artikel “Een Eereschuld” oleh C. Th. Van Deventer adalah diterbitkan	
		Sejak 1900	> fase Kebijakan Etis	
		1905		> Penandatanganan Plakat Singkat (Korte Verklaringen) pertama di Sulawesi Tengah > awal dampak langsung pada lanskap Budaya
	<b>Pemerintahan</b>	1942	> berakhirnya penjajahan Belanda	> Dampak Jepang di Sulteng

Jepang dan kemerdekaan		dan dimulainya penjajahan Jepang
	1945	> kemerdekaan Indonesia > perang penaklukan kembali Belanda
	1949	> pengakuan akhir kemerdekaan

**Tabel 2: Pengaruh Pemerintahan Kolonial Belanda terhadap Lanskap Budaya *Onderafdeeling* Palu**

<b>Konsekuensi penjajahan terhadap <i>onderafdeeling</i> Palu 1905–1942</b>	
<b>Pertanian</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Regenerasi lahan lama dan pemasangan petak sawah baru</li> <li>&gt; Pengenalan bajak (sejak 1930)</li> <li>&gt; Kewajiban rumah tangga menanam pohon kelapa (kopra = hasil ekspor)</li> <li>&gt; Melemahkan ekonomi subsisten dengan meningkatkan ketergantungan pada ekonomi produk kapitalis</li> <li>&gt; Pengenalan sistem tumpang sari (jagung di petak sawah) untuk meningkatkan hasil per hektar</li> </ul>
<b>Kehutanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Penetapan cagar alam untuk mencegah perladangan berpindah dan deforestasi</li> </ul>
<b>Migrasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pendirian pemukiman pertanian masyarakat Jawa Kristen</li> <li>&gt; Pemandahan paksa penduduk gunung ke lembah Palu</li> </ul>
<b>Pendidikan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Menyiapkan sistem sekolah</li> <li>&gt; Kemungkinan belajar untuk elit lokal untuk mempertahankan pengikut setia</li> </ul>
<b>Misionaris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Penyerahan mandat misionaris kepada Bala Keselamatan</li> <li>&gt; Tidak hanya orientasi agama, tetapi persiapan untuk pembangunan kolonial yang efektif</li> <li>&gt; Penghancuran hubungan pertukaran tradisional dataran rendah-dataran tinggi</li> </ul>
<b>Pengangkutan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pembangunan dan perluasan jaringan jalan</li> <li>&gt; Pembangunan jalan utama di daerah produk ekspor: Palu barat, timur sungai Palu (proyek irigasi), Lembah Gimpu (landschap Kulawi)</li> <li>&gt; Motorisasi</li> </ul>
<b>Kuangan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pengenalan pajak pendapatan, pajak pasar dan pajak kepala</li> </ul>
<b>Kerja Paksa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Pengenalan <i>heerendiensten</i> (tingkat daerah) dan <i>kampongdiensten</i> (tingkat daerah)</li> </ul>

Gambar 4: Peta Petak Sawah di Lembah Palu 1938

